



LAKIP Distanhorbun Sumbar 2017



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN

Jln. Raya Padang-Indarung Km. 8 Bandar Buat Padang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2017





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

LAKIP ini disusun Berdasarkan Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden dan salinannya kepada kepala BPKP dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, oleh karena itu untuk tahun 2017 ini, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun LAKIP berdasarkan pedoman yang terbaru yakni berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP tahun 2017 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2017, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2017 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Terima kasih.

Padang, Januari 2018
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Ir. CANDRA, MSi



Pembina Utama Madya
NIP.19600427 198803 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi ,jangka menengah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat adalah ***“TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN PANGAN DAN KUALITAS HASIL PERTANIAN SERTA RUMAH TANGGA PETANI YANG SEJAHTERA”***.

Dalam rangka mengupayakan pencapaian visi serta berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka misi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi. Sumatera Barat adalah :

- I. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
- II. Mewujudkan Sistem Pertanian Agribisnis dan Agroindustri Berkelanjutan
- III. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Baik
- IV. Mewujudkan Perkembangan Pertanian Organik / Ramah Lingkungan

LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pertanian yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang pada Renstra



Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, dimana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Terwujudnya *Good Governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, maka LAKIP ini disusun. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.



Sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatnya Mutu Produk Hasil, Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3. Akuntabilitas Kinerja Aparatur yang Baik
4. Meningkatnya Pertanian Organik.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat 2016 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 ASPEK STRATEGIS	7
1.5. GAMBARAN ORGANISASI	12
1.6. SUMBER DAYA MANUSIA	18
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN	20
II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 PERENCANAAN STRATEGIK	22
2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2017	27
2.3 PERJANJIAN KINERJA	38
III AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	43
3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	44
3.2.1 HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGI	44
3.2.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	46
3.3 ISU – ISU STRATEGIS	94
3.4 REALISASI ANGGARAN	99
3.4.1 APBD (DPA – OPD)	99



3.4.2	APBN (DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN)	112
-------	---	-----

IV	PENUTUP	119
-----------	----------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin	18
2.1	Perjanjian Kinerja Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2017	41
3.1	Kategori Penilaian Sasaran Strategis	43
3.2	Hasil Pengukuran Target dan Realisasi Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis	44
3.3	Hasil Pengukuran Target, Realisasi dan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan produksi TPHP pada Sasaran Strategis 1	47
3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2015 - 2017	48
3.5	Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi Tanam Sabatang	51
3.6	Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan SL Masyarakat Tanam Padi	52
3.7	Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung	58
3.8	Kawasan komoditi Unggulan Tanaman Pangan di Sumbar	60
3.9	Kawasan komoditi Unggulan Tanaman Hortikultura di Sumbar	61
3.10	Indikator Kinerja Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Indikator Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	68
3.11	Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja dan Sasaran Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	71
3.12	Penyaluran Alat Mesin Pertanian Tahun 2017	72
3.13	Alokasi Pupuk Bersubsidi	75
3.14	Luas Serangan OPT dan Luas Petanaman Komoditi Unggulan di Sumbar tahun 2017	76
3.15	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja dan Strategi Luas Serangan OPT	77
3.16	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 tahun 2013	77



	– 2017	
3.17	Jumlah SDM Penyuluh yang mendapat Fasilitas Bimtek dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas	79
3.18	Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 2	81
3.19	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 tahun 2013 – 2017	82
3.20	Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 3	87
3.21	Realisasi Luasan Pertanian Organik di Sumatera Barat tahun 2013 - 2017	87
3.22	Data Sertifikat Organik Kelompok Tani tahun 2017 di Sumatera Barat	89
3.23	Target Pengukuran Kinerja Aparatur Pemerintah yang Baik	91
3.24	Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Distanhorbun Sumatera Barat 2017	92
3.25	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan tahun 2017	93
3.26	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Formal tahun 2017	94
3.27	Realisasi Fisik dan Keuangan masing-masing Prpgram/Kegiatan untuk Biaya Langsung	102
3.28	Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Dana APBN Dekonsentrasi	112
3.29	Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Dana APBN Tugas Pembantuan	114



DAFTAR GRAFIK

1	Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura tahun 2015 - 2017	49
2	Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Padi Tahun 2015 - 2017	50
3	Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Jagung Tahun 2015 - 2017	59
4	Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Manggis Tahun 2015 - 2017	63
5	Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Cabe Tahun 2015 - 2017	65
6	Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Bw. Merah Tahun 2015 - 2017	67
7	Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Kakao Tahun 2015 - 2017	69
8	Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Karet Tahun 2015 - 2017	69
9	Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Kelapa Sawit Tahun 2015 - 2017	70
10	Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Kopi Tahun 2015 - 2017	70
11	Peningkatan Jumlah Kelompok UP3HP di Sumatera Barat	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan Strategis Pembangunan pertanian merupakan salah satu bagian dari pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan secara keseluruhan dan berkelanjutan karena menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi, ekologi, lingkungan pengembangan wilayah dan banyaknya tenaga kerja yang terlibat serta menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian sehingga berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya sektor pertanian diantaranya : 1) potensi sumber dayanya yang besar dan beragam, (2) pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, dan (4) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Selain itu, pembangunan pada sektor pertanian selalu diidentikkan dengan ketersediaan pangan atau ketahanan pangan. Ketersediaan

pangan juga menjadi salah satu indikator berhasil tidaknya program pembangunan pertanian, sehingga ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama pembangunan pada bidang pertanian, mengingat luas wilayah, keanekaragaman komoditas pangan dan sumberdaya manusia masih memungkinkan untuk berswasembada.

Gambar I. Struktur PDRB Sumatera Barat Tahun 2016



Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam SBDA 2017, struktur perekonomian Sumatera Barat yang terbesar adalah sektor pertanian (24,06%), diikuti sektor perdagangan (17,90%), sedangkan terendah adalah Sektor listrik dan gas (0,11%) dan sektor air, pengelolaan sampah (0,09%). Dapat dilihat kontribusi sektor pertanian adalah yang



dominan dan masih merupakan tulang punggung perekonomian di Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi sumberdaya alam yang relatif baik dan juga teknologi pertanian yang cukup maju, sehingga Provinsi Sumatera Barat dapat berperan besar dalam memasok produk pertanian bagi kebutuhan nasional. Tetapi berbagai tantangan dan hambatan di sektor pertanian juga dihadapi diantaranya yaitu kurang optimalnya pemanfaatan lahan, difersifikasi usaha tani yang rendah, buruh tani yang semakin langka dan juga masalah pemasaran hasil yang masih terkendala. Untuk menghadapi permasalahan di sektor pertanian tersebut di upayakan melalui program dan kegiatan pada sektor pertanian yang didapat melalui suatu proses perencanaan, dan juga dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diharapkan birokrasi pemerintah mampu membuat suatu Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) dan Pengukuran Kinerja serta Laporan Pertanggungjawaban



Kinerja (*Performance Accountability Report*) secara baik terutama pada kebijakan pembangunan perkebunan, dan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan stratejik yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).

Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat terakhir tanggal 15 Desember 2015 Nomor. 065/1690/ED/GSB-2015.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan penguatan Akuntabilitas Kinerja dan pengembangan manajemen kinerja Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Unit Kerja Mandiri akan dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik di Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 15) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 64 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) dan Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPT-Perkebunan);
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan



Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Tujuan khusus penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, LAKIP juga dapat dijadikan sebagai *feed back* yang berharga dalam memperbaiki kinerja Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

1.4. Aspek Strategis

Pembangunan pertanian secara umum dan pembangunan sub sektor Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat baik langsung seperti dalam pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan pangan, maupun tidak langsung melalui peningkatan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan



hubungan sinergis dengan sektor lain. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peranan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan koordinasi dan pemberian fasilitasi bagi pelaksana pembangunan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat.

Pembangunan sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, mengembangkan usaha profesional yang efektif dan efisien serta mampu bersaing di pasar bebas, baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga punya kontribusi terhadap perekonomian daerah. Berbagai usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura baik secara aspek produksi, pengolahan maupun pemasaran memiliki potensi besar sebagai sumber percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Revitalisasi pertanian menjadi penting tidak hanya dalam mendorong percepatan pertumbuhan produksi, tetapi juga dalam peningkatan nilai tambah produk lokal dengan pengembangan agroindustri di pedesaan.

Program pembangunan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha dan mutu produk melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan sumberdaya alam dan



sumberdaya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta.

Guna mengupayakan memenuhi kebutuhan akan produk tanaman pangan hortikultura dan perkebunan domestik dan ekspor diperlukan usaha peningkatan produksi yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha, mutu produk dan produktivitas melalui penguasaan Iptek, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan Penilaian atas Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia (Petani), Isu-Isu strategis dan strategi pengembangan pertanian sebagai berikut: Sumatera Barat mempunyai potensi lahan sawah dan lahan kering. Luas lahan sawah adalah 230.175,8 ha, terdiri dari sawah irigasi 185.517 ha, serta sawah tadah hujan, pasang surut dan lainnya seluas 42.752,6 ha, sedangkan luas lahan kering untuk tanaman pangan adalah 745.144,2 ha.

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, sedang kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan



peternakan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perikanan dan kelautan, dan kawasan hutan.

Adapun isu strategis pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Provinsi Sumatera Barat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. ASPEK TEKNIS
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
 - b. Alih fungsi lahan.
 - c. Perbaikan infrastruktur di pedesaan.
 - d. Peningkatan mutu dan keamanan pangan.
 - e. Kelembagaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
 - f. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian.
2. ASPEK EKONOMIS
 - a. Penguatan daya saing ekonomi.
 - b. Peningkatan akses permodalan petani.
 - c. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian.
 - d. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
3. ASPEK SOSIAL
 - a. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani.
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian.
 - c. Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar
4. ASPEK EKOLOGIS



- a. Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Pelestarian dan pemanfaatan agen hayati dan pestisida nabati.
- c. Pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

Fokus pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengembangan ekonomi rakyat, yang bersumber bukan hanya dari kegiatan usaha tani (on - farm) saja, tetapi justru sebagian besar dari kegiatan di luar usaha tani (off – farm). Beberapa hal yang mendasar dalam pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dilaksanakan melalui strategi pengembangan pertanian sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan petani melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani
- b. Mengembangkan teknologi selaras alam dengan mengutamakan penggunaan bahan dan sumber daya lokal serta teknologi spesifik lokasi (kompos jerami, kincir air irigasi, bajak kerbau, pupuk kandang, embung, agens hayati, pestisida hayati, pestisida nabati dan predator burung hantu)
- c. Pengembangan kawasan komoditi, produksi dan agroindustri



- d. Mengembangkan infrastruktur kelembagaan untuk mendukung petani selaras alam (Lembaga sertifikasi organik, Pusat studi dan Pusat pelatihan, Laboratorium, Lembaga Perbenihan)
- e. Menyiapkan insentif untuk petani yang menghasilkan produk organik dan menerapkan budidaya pertanian yang baik dan benar

1.5. Gambaran Organisasi

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat merupakan hasil penggabungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian pada periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan kedudukan sebagai :

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pertanian
2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera



Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pertanian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pertanian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura dan Bidang Perkebunan
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi berdasarkan Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2008 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. *Sub Bagian Kasubag Umum Kepegawaian Keuangan & Aset*
 - b. *Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi*
3. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
 - a. *Seksi Lahan Irigasi & Pembiayaan*
 - b. *Seksi Pengawasan Pupuk Pestisida & Alsin*



- c. *Seksi Kelembagaan*
- 4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. *Seksi Pangan*
 - b. *Seksi Hortikultura*
 - c. *Seksi Benih*
- 5. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a. *Seksi Produksi*
 - b. *Seksi Pembenihan/ Pembibitan*
 - c. *Seksi Perizinan & Pengembangan Kebun Rakyat*

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

- a. *Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)*
 - Kepala
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- b. *Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH).*
 - Kepala
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. *Balai Diklat Pertanian (BDP)*
 - Kepala
 - Sub Bagian Tata Usaha



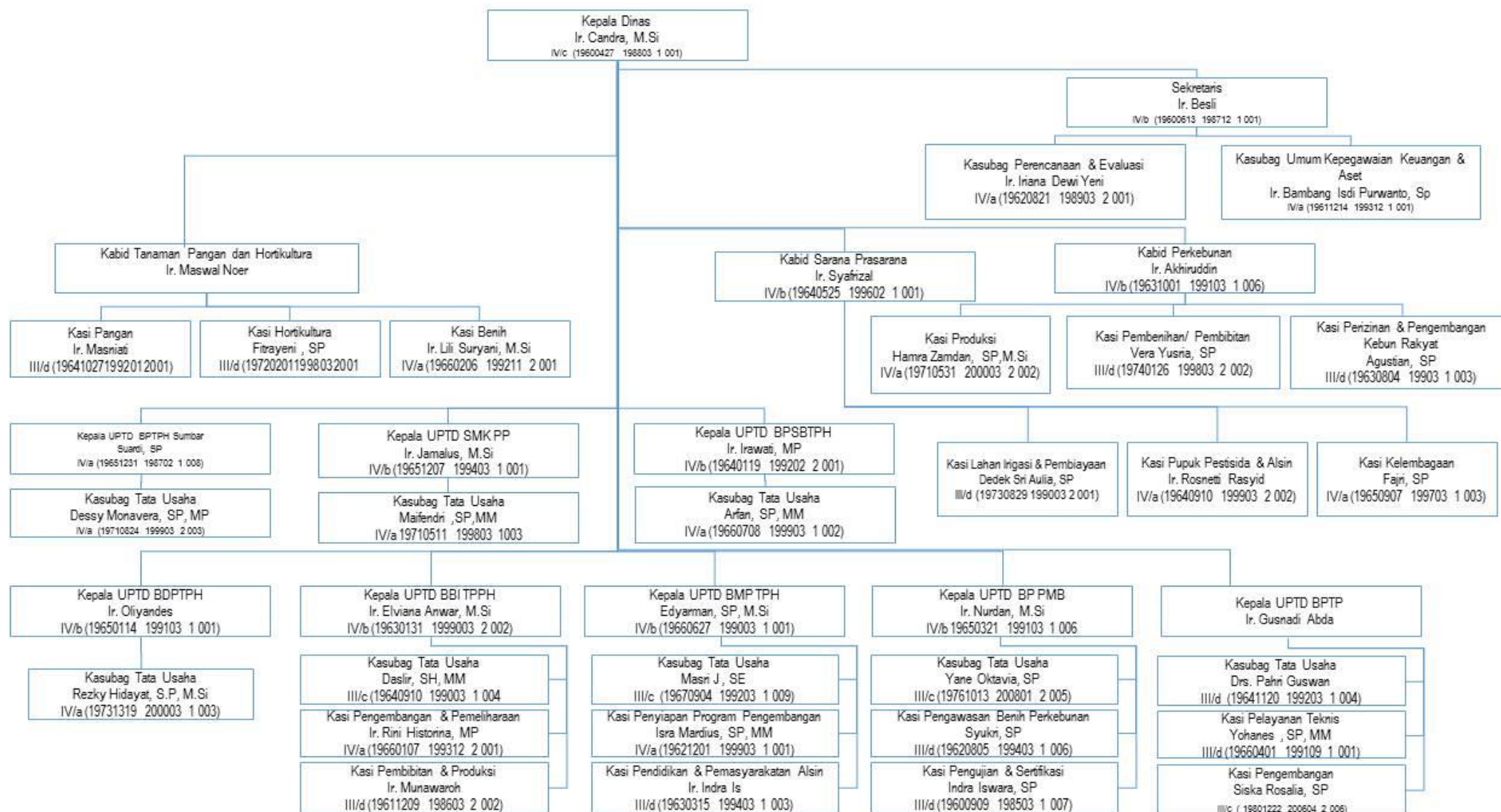
- Kelompok Jabatan Fungsional
- d. *Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBI TPH).*
- Kepala
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pembibitan dan Produksi
 - Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan
- e. *Balai Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (BMP TPH).*
- Kepala
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. *Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN) terdiri dari*
- Kepala
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- g. *Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (UPTD-BP2MB).*
- Kepala
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pembibitan dan Produksi
 - Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- h. *Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD- BPT) sebagai berikut :*



- Sub. Bagian Tata Usaha
- Seksi Pelayanan Teknis
- Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan PHT
- Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat





1.6. Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumberdaya Aparatur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel data pegawai berikut ini.

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG/JENIS KELAMIN									
		GOLONGAN RUANG IV								JUMLAH	
		A		B		C		D			
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1	PROVINSI	2	6	3	0	0	0	1	0	6	6
2	BPTPH	26	6	6	3	0	1	0	0	32	10
3	BPSBTPH	6	0	1	1	1	1	0	0	8	2
4	BDP TPH	1	0	1	1	0	4	0	1	5	2
5	BBi TPH	2	1	1	0	0	0	0	0	3	1
6	BMP TPH	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0
7	SMK PP N	2	4	1	0	0	0	0	0	4	4
8	BID. BUN	4	1	3	1	0	0	0	0	7	2
9	BAKORLUH	1	0	3	2	0	0	0	0	4	2
	JUMLAH	45	18	23	8	1	2	1	1	70	29
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG III								JUMLAH	
		A		B		C		D			
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W



1	PROVINSI	9	6	14	15	10	9	8	8	41	38
2	BPTPH	5	5	3	7	9	2	71	9	88	23
3	BPSBTPH	5	9	4	6	2	4	7	9	18	28
4	BDP TPH	0	0	1	1	3	0	3	2	7	3
5	BBi TPH	4	0	4	4	0	3	1	4	9	11
6	BMP TPH	3	2	0	0	0	0	3	0	6	2
7	SMK PP N	5	4	2	5	3	1	0	2	10	12
8	BID. BUN	8	6	7	9	2	5	8	5	25	25
9	BAKORLUH	0	0	0	1	1	2	2	1	3	4
	JUMLAH	39	32	35	48	30	26	103	40	207	146
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG II								JUMLAH	
		A		B		C		D			
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1	PROVINSI	2	0	8	2	4	5	0	2	14	8
2	BPTPH	2	0	5	1	4	6	4	0	15	7
3	BPSBTPH	2	0	1	0	2	5	4	1	9	6
4	BDP TPH	1	1	0	1	4	3	0	0	5	5
5	BBi TPH	1	0	3	1	2	2	0	0	6	3
6	BMP TPH	1	0	4	1	1	1	0	0	6	2
	SMK PP N	3	0	1	0	2	0	0	0	6	0
	BID. BUN	0	1	1	0	3	0	6	9	10	10
	BAKORLUH	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
	JUMLAH	12	2	23	6	25	22	14	12	74	42
NO	UNIT	GOLONGAN RUANG I								JUMLAH	
		A		B		C		D			



	KERJA	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1	PROVINSI	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0
2	BPTPH	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
3	BPSBTPH	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
4	BDP TPH	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
5	BBI TPH	4	0	0	0	0	0	1	0	5	0
6	BMP TPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SPP N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BID. BUN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
9	BAKORLUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	5	0	0	0	2	0	4	1	11	1

Potensi pelayanan yang tersedia pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dengan sumberdaya manusia dan kelembagaan merupakan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan terutama perannya sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Selanjutnya potensi pelayanan pembangunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang berada pada Kabupaten/Kota akan dapat mendukung upaya – upaya pembangunan beserta seluruh unit kerja yang di Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian dan para penyuluh pertanian dengan segenap organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pertanian.



Untuk mendukung penerapan teknologi pertanian, Provinsi Sumatera Barat memiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Sedangkan pada unit kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan didukung pula dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni, Balai Proteksi TPH, Balai Benih Induk TPH, Balai Pengawasan Sertifikasi Benih, Balai Diklat Pertanian TPH, Balai Mekanisasi Pertanian TPH, SMK-PP N Padang.

1.7. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, aspek strategis, gambaran organisasi, sumber daya manusia, dan sistematika penulisan LAKIP Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat

Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Perencanaan Strategis 2016-2021 yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategis dan kebijakan. Selanjutnya juga memuat Rencana Kerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA



Menjelaskan Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi yang terdiri dari hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dan analisis kinerja sasaran strategis yang dirinci per sasaran strategis. Selanjutnya juga memuat realisasi anggaran tahun 2016

Bab IV : PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Proses pembangunan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang telah berlangsung sampai dengan tahun 2017 telah menghasilkan berbagai kemajuan, walaupun masih terdapat berbagai masalah dalam dinamika pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura perkebunan tersebut baik bersifat internal maupun eksternal. Sehingga diperlukan visi dan misi yang kuat sebagai dasar untuk mencapai target yang akan dicapai dalam Rencana Strategis 2017-2021.

2.1. Perencanaan Strategis 2017-2021

2.1.1. Visi

Sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan VISI tahun 2017-2021 yakni ***"TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN PANGAN DAN KUALITAS HASIL PERTANIAN SERTA RUMAH TANGGA PETANI YANG SEJAHTERA"***.

2.1.2. Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi dengan cara mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Dinas



Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

V. Mewujudkan Kedaulatan Pangan

VI. Mewujudkan Sistem Pertanian Agribisnis dan Agroindustri Berkelanjutan

VII. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Baik

VIII. Mewujudkan Perkembangan Pertanian Organik / Ramah Lingkungan

2.1.3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Jangka Menengah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian serta tugas pembantuan, dan sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
2. Meningkatkan Mutu Produk Hasil, Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional
4. Mengembangkan Pertanian Organik yang Modern.

Strategi Dan Kebijakan

Strategi Pembangunan Pertanian sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bertumpu pada kondisi strategis lingkungan baik



lingkungan internal maupun eksternal, SDM serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki.

Penggunaan waktu keluarga petani yang lebih efisien dan aktivitas yang lebih banyak dari beberapa sub sektor yang berkaitan merupakan fokus pembangunan pertanian, sehingga untuk alokasi waktu yang sama keluarga petani akan memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Strategi umum yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam rencana strategis tahun 2017 – 2021, Sasaran strategis dalam membangun pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan kedepan di Sumatera Barat adalah :

5. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
6. Meningkatnya Mutu Produk Hasil, Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
7. Akuntabilitas Kinerja Aparatur yang Baik
8. Meningkatnya Pertanian Organik.

Secara konseptual pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dilakukan melalui pendekatan sistim agribisnis yaitu kinerja keseluruhan sub sistim usaha yang saling terkait, saling tergantung dan saling berpengaruh dengan pertanian mulai sektor hulu, usaha tani dan hilir serta jasa penunjang. Penggunaan waktu keluarga petani yang lebih efisien dan aktivitas yang lebih banyak dari beberapa sub sektor yang



berkaitan merupakan fokus pembangunan pertanian kedepan, sehingga untuk alokasi waktu yang sama keluarga petani akan memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Untuk mewujudkan rumah tangga petani yang sejahtera, kebijakan pembangunan pertanian adalah :

5. Meningkatkan produktivitas dan produksi komoditi unggulan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan .
6. Pengembangan kawasan sentra produksi agribisnis
7. Meningkatkan efisiensi usahatani dan mutu produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
8. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien
9. Meningkatkan pemberdayaan aparatur, pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.
10. Meningkatkan pemberdayaan petani
11. Mengembangkan usaha-usaha peningkatan nilai tambah komoditi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan unggulan
12. Pengembangan komoditi unggulan yang berdaya saing
13. Melakukan pemasyarakatan pertanian organik dan memfasilitasi sistem pertanian organik
14. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana, lahan air dan alsintan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
15. Mengembangkan LKMA di pedesaan



16. Pembentukan sentra produksi perkebunan sesuai potensi
17. Penguatan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi untuk pendidikan lanjutan bagi penyuluh
18. Peningkatan Koordinasi, Lobi dan Kerjasama dengan Badan Diklat di Pusat
19. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi penyuluh
20. Pengembangan metodologi penyuluhan
21. Pengembangan dan penerapan teknologi di lapangan
22. Pembinaan dan pendampingan program dan kegiatan oleh penyuluh
23. Penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan dan swasta (CSR)
24. Fasilitasi temu petani, penyuluh dan peneliti
25. Fasilitasi program dan kegiatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)
26. Pembinaan, pendampingan dan pengawalan program dan kegiatan di BPK
27. Pengintegrasian usaha pertanian pada satu kawasan
28. Perluasan kawasan integrasi.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2017

Program pembangunan pertanian subsektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas yang mengarah pada peningkatan



efisiensi usaha dan mutu produk melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta. Program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui dana APBD 2 Provinsi Sumatera Barat dan Dana APBN TA 2017 adalah sebagai berikut :

2.2.1. Program Dan Kegiatan APBD

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian dengan berlandaskan program daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2017 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD (DPA-OPD) sebesar Rp 116.992.511.632,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 59.053.126.590,-
- b. Belanja Langsung sebesar : Rp. 57.939.385.042,-
 - Urusan Pokok : Rp. 10.195.054.705,-
 - Urusan Pilihan : Rp. 47.744.330.337,-

Alokasi penggunaan anggaran biaya tersebut termasuk untuk keperluan kegiatan dan belanja rutin pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017

A. Belanja Tidak Langsung

***Belanja Pegawai dan Tambahan Penghasilan PNS.***

Dana ini digunakan untuk keperluan gaji dan tunjangan lainnya seperti tunjangan daerah dan sejenisnya. Realisasi s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 53.667.239.446,- (90,88 %) dengan fisik 100 %.

B. Belanja Langsung

Belanja langsung terdiri dari Belanja Langsung Urusan Pokok dan Belanja Langsung Urusan Pilihan

▪ ***Belanja Langsung Urusan Pokok.***

Digunakan untuk keperluan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja keuangan.

Alokasi pengguna anggaran biaya tersebut termasuk untuk keperluan kegiatan rutin pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat seperti :

- a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman (BPT TPH)
- b. UPTD Balai Diklat Pertanian (BDP TPH)
- c. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB TPH)
- d. UPTD SMKPP Negeri Padang
- e. UPTD Balai Benih Induk (BBITPH)
- f. UPTD BMP Bukittinggi
- g. UPTD BPTBUN



- h. UPTD BP2MB
- i. Sekretariat Bakorluh

▪ **Belanja Langsung Urusan pilihan Pendidikan dan Pertanian**

Belanja langsung urusan pilihan digunakan untuk keperluan program kegiatan tahun 2017. Kegiatan ini dialokasikan pada 8 (Delapan) program. Untuk lebih jelasnya rincian program/ kegiatan sebagai berikut :

BELANJA LANGSUNG

I URUSAN POKOK

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
- 3 Penyediaan jasa Jaminan barang Milik daerah
- 4 Penyediaan Jasa Kebersihan, pengamanan dan sopir kantor
- 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
- 11 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
- 12 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur



02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1 Pengadaan Mobiler
- 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/rumah dinas/mess
- 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
- 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 8 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- 9 Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan
- 3 Penatausahaan Keuangan OPD

07 Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset



- 1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD
- 2 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD
- 3 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD

II PENDIDIKAN

08 Program Peningkatan SDM Pertanian

- 1 Peningkatan SDM Petugas melalui Diklat Pertanian
- 2 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian pada SMK PP N Padang

09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian

- 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan Pertanian di Balai Diklat Pertanian
- 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK PP N Padang

III PERTANIAN

10 Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas

- 1 Pemasyarakatan Padi Tanam Sabatang
- 2 Pengembangan Jagung
- 3 Pengembangan buah-buahan untuk kesejahteraan petani
- 4 Pengawasan mutu dan sertifikasi benih
- 5 Pengembangan Perbenihan/Pembibitan
- 6 Penyediaan Sarana Brigade dan Pengendalian Serangan OPT
- 7 Peningkatan Perlindungan Tanaman
- 8 Pemantauan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida



- 9 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lahan dan Air
- 10 Identifikasi dan Registrasi Lahan/Kebun Hortikultura
- 11 Pengembangan tanaman pada kawasan TMMN dan Bakti Sosial
- 12 Pendampingan dan Penyusunan RDKK
- 13 Penerapan GAP dan SOP Buah
- 14 Pengembangan buah-buahan di kawasan pesisir
- 15 Penerapan GAP/SOP Sayur
- 16 Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan
- 17 Gerakan Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan
- 18 Pengawasan Peredaran Benih Unggul Perkebunan
- 19 Sertifikasi dan Pengujian Benih Unggul Perkebunan
- 20 Pelatihan Penerapan PHT Pada Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT)
- 21 Revitalisasi Sarana Produksi Tanaman Tembakau (DBHCHT)
- 22 Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat
- 23 Pengendalian Hama Tupai Tanaman Kakao dan Kelapa
- 24 Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kakao
- 25 Gerakan Pemangkasan dan Pemupukan Kakao
- 26 Pengembangan Tanaman Perkebunan Pada Kawasan TMMN dan Bakti Sosial
- 27 Pemantauan Pupuk dan Pestisida Perkebunan
- 28 Peningkatan Penyediaan Baby Kelapa Sawit Bersertifikat
- 29 Identifikasi Pengamatan Penyebaran Kakao BL 50
- 30 Pengawasan Mutu Standar Pestisida



31 Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

32 Demplot pisang Sehat

33 Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)

11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Induk

2 Pengembangan Alsintan dan Bengkel Keliling

3 Pengelolaan sarana dan prasarana agrowisata BBI Lubuk Minturun

4 Peningkatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen

5 Peningkatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian dan Pasca Panen

6 Dukungan pengembangan agrowisata BBI TPH Lubuk Minturun

7 Peningkatan Penerapan Mutu Fermentasi Kakao

8 Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Balai Diklat Pertanian (DAK)

9 Pembangunan/Rehabilitasi UPTD SMK PP (DAK)

12 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

1 Penyediaan Benih Sumber Kentang Bermutu

2 Pemurnian Varietas dan Adaptasi Pelepasan Varietas (varietas lokal)

3 Penyelenggaraan Penas Tani

4 Penumbuhan dan Pengembangan Desa Mandiri Benih

5 Penyusunan dan Updating Data Perkembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan



- 6 Pembinaan dan peningkatan SDM Tenaga pendamping POPT dan PMT
- 7 Penyebarluasan Informasi / bahan publik (jumpa pers, temu kehumasan, dialog inter aktif dan advokasi di media cetak
- 8 Koordinasi Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani
- 9 Temu Rembuk Petugas Pengamat OPT
- 10 Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan Brigade Proteksi
- 11 Revitalisasi Kelembagaan Petani Gambir
- 12 Penerapan Inovasi Teknologi Kawasan Pada Sentra kakao, Kopi dan Kelapa
- 13 Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan
- 14 Pembinaan SDM Penyuluh Pertanian
- 15 Sosialisasi dan Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi
- 16 Pembinaan dan Pengembangan penangkar tanaman pangan dan Hortikultura
- 17 Pelatihan Penangkar dan Pengembangan Kacang Tanah, ubi jalar
- 18 Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Alsintan
- 19 Pemberdayaan Kelembagaan Tani
- 20 Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Pelatihan Petani Swadaya
- 21 Peningkatan SDM Petugas dan Penangkar Benih Perkebunan
- 22 Pelatihan Perbanyak Agen Pengendalian Hayati Tricoderma sp
- 23 Sosialisasi Penggunaan Bibit Bersertifikat
- 24 Pelatihan Lapangan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Perkebunan
- 25 Pembinaan Penyuluh Swadaya
- 26 Pembinaan Balai Penyuluhan Model



27 Pembinaan Kelembagaan Tani

13 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil

- 1 Pengembangan dan Peningkatan SDM kelp. Pengolahan Hasil serta Nilai Tambah produk Pertanian
- 2 Peningkatan Mutu Produk Olahan Kelompok Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP)
- 3 Sertifikasi Pangan dan Pemasyarakatan Pertanian Organik
- 4 Promosi Pemasaran Hasil Pertanian dan Penyebaran Informasi Pasar
- 5 Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
- 6 Promosi dan Expo Komoditi Perkebunan
- 7 Penetapan Harga dan Pengawasan Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
- 8 Indikasi Geografis Kopi Spesial (Arabika)
- 9 Peragaan Mutu Kopi Sumatera Barat
- 10 Pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Komoditi Perkebunan
- 11 Peningkatan Standarisasi Hasil Perkebunan
- 12 Pembinaan dan Peningkatan Mutu Produk Olahan Pertanian Secara Terpadu
- 13 Lomba Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 14 Penyusunan Profil Kakao dan Kopi Arabika
- 15 Gelar Diversifikasi Produk Kelapa Rakyat
- 16 Peningkatan Olahan Produk Kelapa Rakyat
- 17 Optimasi Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tebu

14 Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis

- 1 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat
- 2 Peningkatan Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat



- 3 Pengembangan dan Perluasan Tanaman Kopi Rakyat
 - 4 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Padi
 - 5 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Jagung
 - 6 Pembinaan dan Pengembangan Manggis
 - 7 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 8 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Sayur
 - 9 Pembinaan dan Pengembangan Jeruk
 - 10 Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Hias
 - 11 Perluasan Tanaman Pala Rakyat
 - 12 Perluasan Tanaman Cengkeh
 - 13 Peremajaan Tanaman Kelapa Rakyat
 - 14 Pengembangan Kultivar Tebu Rakyat
 - 15 Pengembangan Nagari Model Kakao dan Kelapa
 - 16 Penyusunan data komoditi perkebunan
- 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN**
- 1 Penyusunan Programa Penyuluhan
 - 2 Pengelolaan Data dan Informasi Penyuluhan
 - 3 Pembinaan Stakeholder Penyuluhan
 - 4 Gerakan Penyuluhan Pada Kawasan Terintegrasi

2.2.2. Program Dan Kegiatan APBN

Pada tahun 2017 untuk Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Barat melalui dana APBN (Dana Dekonsentrasi dan



Dana Tugas Pembantuan), Implementasi anggaran dan kegiatan tertuang dalam 4 (empat) program yaitu :

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 03) yang terdiri dari :
 - Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal
 - Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
 - Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
 - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
- b. Program Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah Hortikultura (Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (04)) yang terdiri dari :
 - Peningkatan Pengembangan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
 - Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
 - Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura
 - Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
 - Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
 - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Florikultura



- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (08)) yang terdiri dari :
- Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
 - Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen BSP
 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
 - Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha
 - Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
- d. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (05)) yang terdiri dari :
- Pengembangan Tanaman tahunan
 - Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman tahunan dan Penyegar
 - Pengembangan Tanaman Penyegar Lainnya
 - Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan Kering
 - Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
 - Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan
 - Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya
 - Pengembangan Tanaman Semusim dan Lainnya



- Pengembangan Tanaman Rempah
 - Perluasan Tanaman Semusin dan Rempah di Lahan Kering
 - Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
 - Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan
 - Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan
 - Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
 - Fasilitasi Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
- e. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan (Dana Dekonsentrasi (10) yang terdiri dari :
- Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS
 - Kursus dan Rembuk Tani Poktan Penyuluh (PNS, THL – TH PP) di tingkat Desa.
 - Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan RPJMD Sumatera Barat tahun 2016 - 2021, maka dari 5 Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat 1 (satu) misi yang merupakan sasaran yang harus dicapai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat yaitu pada Misi 4 : **“Mewujudkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah”**



dengan beberapa sasaran dan strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 4 pada prioritas pengembangan pertanian berbasis komoditi kawasan dan komoditi unggulan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2015 - 2019, dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 6 (enam) target utama, yaitu:

1. Pencapaian Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai.
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bio industri dan bioenergi.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat 2016 – 2021, Renstra Kementerian Pertanian 2015 - 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 - 2021, maka telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2017 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Persentase Produksi Tanaman Hortikultura dan Perkebunan (%).



- ◆ Padi
 - ◆ Jagung
 - ◆ Manggis
 - ◆ Cabe
 - ◆ Bawang Merah
 - ◆ Kakao
 - ◆ Karet
 - ◆ Kelapa Sawit
 - ◆ Kopi
2. Meningkatnya mutu produk dan nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan:
- a. Jumlah produk yang sudah ada standarisasi (buah)
 - b. Jumlah Kelompok tani yang sudah melakukan proses pengolahan (keltan)
3. Berkembangnya Pertanian Organik (Ha/tahun)
- a. Bertambahnya luasan pertanian organik (ha)
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
- a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 - b. Persentase Pencapaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan (%)
 - c. Persentase Pencapaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (%)



Target yang ingin dicapai pada indikator kinerja sasaran strategis dalam pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan di Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 2.1. Perjanjian kinerja Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	A	Peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	%	
			- Padi		2,22
			- Jagung		8,41
			- Manggis		2
			- Cabe		2
			- Bawang Merah		2
			- Kakao		13,5
			- Karet		2,97
			- Kelapa Sawit		3,85
			- Kopi		7,13
	Meningkatnya Mutu Produk dan Nilai	B	Jumlah Produk yang sudah ada	Buah	10



2	Tambah Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Standarisasi		
		C	Jumlah Kelompok Tani yang sudah melakukan proses pengolahan	Keltan	15
3	Berkembangnya Pertanian Organik	D	Bertambahnya Luasan Pertanian Organik	Ha	200
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	E	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		70,48
		F	Persentase Pencapaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan	%	100
		G	Persentase Pencapaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	%	95

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.1 : Kategori Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal



3.2. Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan perjanjian kinerja yang ada dan setelah dievaluasi maka hasil pengukuran capaian target dari sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.2. Hasil Pengukuran Target dan Realisasi Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan	A Peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)		
		- Padi	2,22	10,78
		- Jagung	8,41	49,23
		- Manggis	2	25,32
		- Cabe	2	48,37
		- Bw. Merah	2	44,33
		- Kakao	13,5	-18,77
		- Karet	2,97	3,04
		- Kelapa Sawit	3,85	4,08
		- Kopi	7,13	-9,98



2	Meningkatnya Mutu Produk dan Nilai Tambah Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	B	Jumlah Produk yang sudah ada Standarisasi (buah)	10	15
		C	Jumlah Kelompok Tani yang sudah melakukan proses pengolahan (keltan)	10	18
3	Berkembangnya Pertanian Organik	D	Bertambahnya Luasan Pertanian Organik (Ha/thn)	200	200
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	E	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,48	
		F	Persentase Pencapaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan (%)	100	99,94
		G	Persentase Pencapaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan (%)	95	91,64

Penentuan target dari masing-masing indikator diperoleh dari sasaran renstra, data realisasi dari tahun sebelumnya dan prakiraan anggaran yang ada pada tahun 2017.

Persentase capaian realisasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Realisasi Tahun 2017} - \text{Realisasi Tahun 2016})}{\text{Realisasi Tahun 2016}} \times 100 \%$$

Realisasi Tahun 2016



- Padi : Produksi Padi tahun 2016 (ATAP) = 2.503.452 ton
Produksi Padi tahun 2017 (ARAM II) = 2.773.478 ton
Persentase capaian realisasi = $\left(\frac{2.773.478 - 2.503.452}{2.503.452} \right) \times 100 \% = \mathbf{10,78}$

- Jagung : Produksi Jagung tahun 2016 (ATAP) = 711.518 ton
Produksi Jagung tahun 2017 (ARAM II) = 1.061.821 ton
Persentase capaian realisasi = $\left(\frac{1.061.821 - 711.518}{711.518} \right) \times 100 \% = \mathbf{49,23}$

- Manggis : Produksi Manggis tahun 2016 (ATAP) = 23.289 ton
Produksi Manggis tahun 2017 (ASEM) = 29.186 ton
Persentase capaian realisasi = $\left(\frac{29.186 - 23.289}{23.289} \right) \times 100 \% = \mathbf{25,32}$

- Cabe : Produksi Cabe tahun 2016 (ATAP) = 68.224 ton
Produksi Cabe tahun 2017 (ASEM) = 101.227 ton
Persentase capaian realisasi = $\left(\frac{101.227 - 68.224}{68.224} \right) \times 100 \% = \mathbf{48,37}$

- Bw. Merah : Produksi Bw. Merah tahun 2016 (ATAP) = 66.543 ton
Produksi Bw. Merah tahun 2017 (ASEM) = 96.040 ton
Persentase capaian realisasi = $\left(\frac{96.040 - 66.543}{66.543} \right) \times 100 \% = \mathbf{44,33}$

- Kakao : Produksi Kakao tahun 2016 (ATAP) = 69.535 ton
Produksi Kakao tahun 2017 (ASEM) = 56.481 ton
Persentase capaian realisasi = $\left(\frac{56.481 - 69.535}{69.535} \right) \times 100 \% = \mathbf{- 18,77}$



- Karet: Produksi Karet tahun 2016 (ATAP) = 166.318 ton
Produksi Karet tahun 2017 (ASEM) = 171.375 ton

$$\text{Persentase capaian realisasi} = \left(\frac{171.375 - 166.318}{166.318} \right) \times 100 \% = \mathbf{3,04}$$

- Kelapa Sawit: Produksi Sawit tahun 2016 (ATAP) = 1.205.301 ton
Produksi Sawit tahun 2017 (ASEM) = 1.254.463 ton

$$\text{Persentase capaian realisasi} = \left(\frac{1.254.463 - 1.205.301}{1.205.301} \right) \times 100 \% = \mathbf{4,08}$$

- Kopi : Produksi Kopi tahun 2016 (ATAP) = 38.364 ton
Produksi Kopi tahun 2017 (ASEM) = 34.535 ton

$$\text{Persentase capaian realisasi} = \left(\frac{34.535 - 38.364}{38.364} \right) \times 100 \% = \mathbf{- 9,98}$$

- Jumlah produk yang sudah ada standarisasi merupakan realisasi tahun 2017 sebanyak **15** (lima belas) buah produk olahan
- Jumlah kelompok tani yang sudah melakukan proses olahan merupakan realisasi tahun 2017 sebanyak **18** (lima belas) buah produk olahan
- Bertambahnya luasan pertanian organik adalah realisasi tahun 2016 sebesar **200** ha per tahun.
- Persentase pencapaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan adalah : Realisasi **Fisik = 99,89 %** dan realisasi **Keuangan = 91,64 %**.

3.2.2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.



Pencapaian kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan pada renstra dinas, yang didukung oleh sasaran strategis dan indikator kinerja yang ada.

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

A. Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang terdiri dari:

Tabel 3.3. Hasil Pengukuran Persentase Target, Realisasi dan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi TPHP dan Sasaran Strategis 1

N	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi
---	---------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------



o	Strategis					Capaian
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :				
		- Padi	%	2,2	10,78	485,58
		- Jagung	%	8,41	49,23	585,37
		- Manggis	%	2	25,32	1.266
		- Cabe	%	2	48,37	2.418,5
		- Bawang Merah	%	2	44,33	2.216,5
		- Kakao	%	13,5	-18,77	339,04
		- Karet	%	2,97	3,04	102,37
		- Kelapa Sawit	%	3,85	4,08	105,97
		- Kopi	%	7,13	-9,98	339,97

Persentase capaian indikator kinerja dihitung sesuai dengan format pengukuran kinerja pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 065/2203/ED/GSB-2017 tanggal 6 Desember 2017 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

➤ **Sesuai atau melebihi target :** $\frac{(realisasi)}{(target)} \times 100\%$

- % capaian Padi = $\frac{(realisasi)}{(target)} \times 100\% = (10,78/2,22) \times 100\% = \mathbf{485,55}$



- % capaian Jagung = $\frac{(realisasi)}{(target)} \times 100\% = (49,23/8,41) \times 100\% = \mathbf{585,37}$
- % capaian Manggis = $\frac{(realisasi)}{(target)} \times 100\% = (25,32/2) \times 100\% = \mathbf{1.266}$
- % capaian cabe = $\frac{(realisasi)}{(target)} \times 100\% = (48,37/2 \times 100\% = \mathbf{2.418,5}$
- % capaian Bw. Merah = $\frac{(realisasi)}{(target)} \times 100\% = (44,33/2) \times 100\% = \mathbf{2.216,5}$
- % capaian Klp.Sawit = $\frac{(realisasi)}{(target)} \times 100\% = (4,08/3,85) \times 100\% = \mathbf{105,97}$
- % capaian Karet = $\frac{(realisasi)}{(target)} \times 100\% = (3,04/2,97) \times 100\% = \mathbf{102,37}$

➤ **Tidak sesuai atau kurang dari target,** $\frac{((2 \times Target) - Realisasi)}{Target} \times 100\%$

- % capaian Kakao = $\frac{((2 \times Target) - Realisasi)}{Target} \times 100\%$
 $= ((2 \times 13,5) - (-18,77)) / 13,5 \times 100\% = \mathbf{339,04}$
- % capaian Kopi = $\frac{((2 \times Target) - Realisasi)}{Target} \times 100\%$
 $= ((2 \times 7,13) - (-9,98)) / 7,13 \times 100\% = \mathbf{339,97}$



Realisasi produksi dan realisasi capaian kinerja komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari tahun 2015 sampai 2017 dapat disajikan pada table berikut :

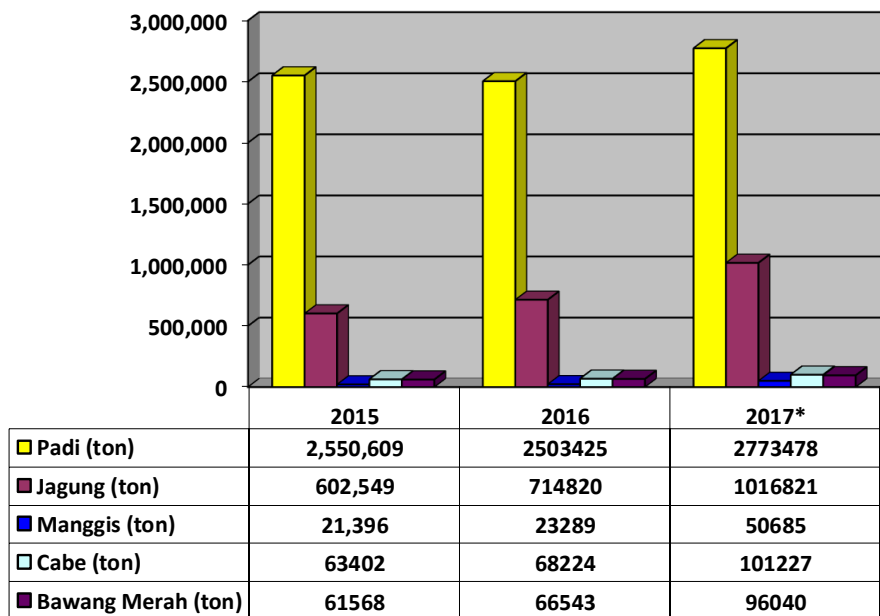
Tabel 3.4. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2015-2017

No	Uraian	Realisasi Tahun			Capaian Kinerja (%)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Peningkatan Produksi							
1	Padi	2.550.609	2.503.452	2.759.737	85,25	126,67	485,58
2	Jagung	602.549	714.820	1.016.821	22,30	236,72	585,37
3	Manggis	21.396	23.289	50.685	476	1.400,38	1.266
4	Cabe	63.402	68.224	101.227			2.418,5
5	Bawang Merah	61.568	66.543	96.040			2.216,5
6	Kakao	85.095	69.535	56.481			339,04
7	Karet	152.526	166.318	171.375			102,37
8	Kelapa Sawit	1.161.039	1.205.301	1.254.463			105,97
9	Kopi	42.926	38.364	34.535			339,97

○ **Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Realisasi produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tabel di atas dapat dilihat dalam bentuk grafik dibawah ini .

Grafik. 1 : Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 – 2017



D

ari
grafik
di atas
terlihat
bahwa
terdapat
peningkatan
produksi

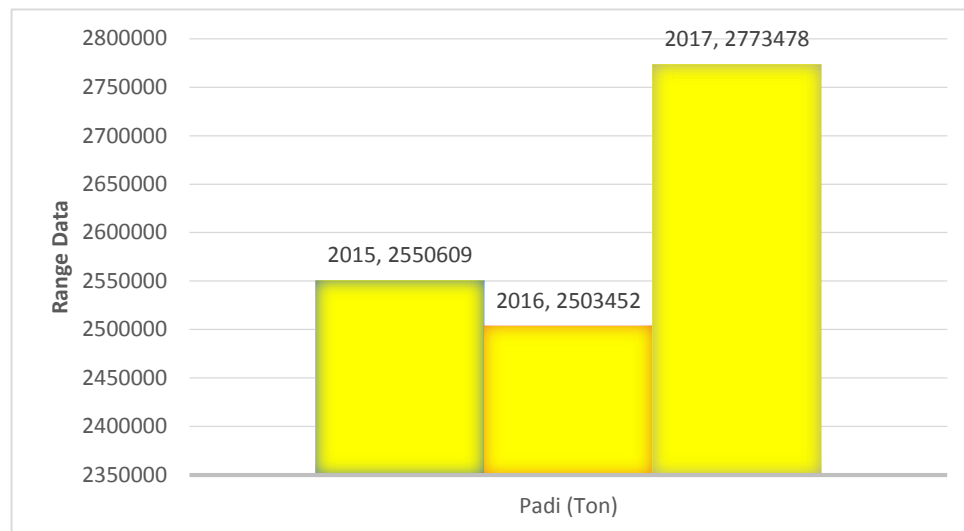
si pertanian dari tahun ke tahun hingga tahun 2017. Jika dilihat secara rinci dari sub indikator yang ada, pada realisasi produksi tanaman pangan (padi dan jagung) terlihat sudah mencapai target yang ditetapkan. Data realisasi masih merupakan Angka Ramalan II tahun 2017 yang merupakan hasil rapat koordinasi bersama di tingkat nasional antara Kementerian Pertanian RI dan Badan Pusat Statistik. Untuk Sumatera Barat data ini merupakan angka kesepakatan antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Angka ini masih akan berubah pada penetapan angka tetap di bulan Juni 2018. Berdasarkan kondisi di lapangan dapat diperkirakan bahwa target produksi padi tersebut akan dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan.

Produksi Padi.

Perkembangan produksi padi tahun 2017 terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu 256.258 ton atau meningkat sekitar 10,79 % dari tahun 2016.

Grafik 2. Perkembangan Produksi Tanaman Padi di Sumatera Barat



Penghitungan jumlah produksi padi ini didapat berdasarkan data survey pertanian (SP) yang dikumpul setiap bulan melalui petugas pengumpul data kecamatan yang kemudian direkap oleh petugas data statistik kabupaten/kota, dan selanjutnya dikirim ke Dinas Provinsi dan



BPS. Selanjutnya data tersebut direkapitulasi menjadi angka produksi Provinsi Sumatera Barat yang disepakati oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan BPS Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan produksi padi didukung dengan kegiatan pendekatan peningkatan luas tanam, luas panen dan peningkatan produktivitas dengan beberapa kegiatan yaitu :

- Peningkatan SDM petani melalui Sekolah Lapangan kegiatan Pengembangan Kawasan Padi Tanam Sabatang di laksanakan pada 10 (Sepuluh) kabupaten dan 16 kelompok tani / gapoktan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi Tanam Sabatang

No	Kab./Kota	Gapoktan/Keltan	A l a m a t
1	50 Kota	Lurah Balai	Nagari Balai Panjang Kecn. Lareh Sago Halaba
2	Pasaman Barat	Sejahtera 3	Nag Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo
3	Solok Selatan	1. Sarumpun Saiyo 2. Surambi Emas 3. Sepakat Jaya	Pakan Rabaa Kec. KPGD Koto Baru Kec. Sungai Pagu



			Luak Kapau Kec. Pauah Duo
4	S o l o k	1. Kayu Tanam 2. Puncak Kadok	Jawi-jawi Kec. Gunung Talang Nag. Batu Banyak Kec. Lembang Jaya
5	Pasaman	Mekar Abadi	Nagari Lubuk Layang Kec. Rao Selatan
6	A g a m	1. Bina Maju 2. Usaha Baru	Nagari Kapau Kec. Tilatang Kamang Nagari Sungai Batang Kec. Tanjung Raya
7	Padang Pariaman	Kampung Guci	Nagari Guguk Kec. 2 x 11 Kayu Tanam
8	Pesisir Selatan	Simpang Tigo	Nagari Sungai Tarab Kec. Sungai Tarab

- Peningkatan SDM petani melalui Sekolah Lapangan Kegiatan Pemasyarakatan Tanaman Padi di dilaksanakan pada 9 (Sembilan) kabupaten dan 10 kelompok tani / gapoktan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. : Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Sekolah Lapangan Pemasyarakatan Tanaman Padi.



No	Kab./Kota	Gapoktan/Keltan	A l a m a t
1	50 Kota	Maju Bersama	Nagari Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban
2	Pasaman Barat	Penangkar Tubas Jaya	Nag Lingkuang Aua Kec. Pasaman
3	Solok Selatan	Andeh Bapak Sipanjang	Pasir Talang Kec. Sungai Pagu
4	S o l o k	1. Sawah Pandan 2. Sawah Bukik	Parambahan Kec. Bukit Sundi Nag. Cupak Kec. Gunung Talang
5	Pasaman	Cahaya Baru	Nagari Lubuk Layang Kec. Rao Selatan
6	A g a m	Baduri	Nag Koto Tengah Kec. Tilatang Kamang

- Melalui Program Usaha Peningkatan Khusus (UPSUS) Pajale (padi, jagung dan kedelai) yang dicanangkan Kementerian Pertanian RI



- untuk mewujudkan Swasembada Pangan Nasional dengan kegiatan antara lain : Penerapan Budidaya Padi seluas 28.900 ha dengan rincian Bantuan Benih Padi Inbrida (Jarwo) seluas 25.500 ha, Budidaya Padi dengan teknologi salibu seluas 1.750 ha dan Penerapan budidaya desa organic untuk padi seluas 140 Ha dan UPPO seluas 20 ha, Desa Mandiri Benih (DMB) sebanyak 5 unit yaitu di Kab. Pesisir Selatan kelompok Timbulun, Agam kelompok Sawah Sago, Solok Selatan kelompok Usaha Saiyo dan Taratak Sakato, Dharmasraya kelompok Anggrek dan Pasaman kelompok Gaya Baru.
- Penggunaan Benih Bersertifikat Padi selama tahun 2017 sebesar 70,6 %.
Untuk pembinaan terhadap produksi benih telah dilakukan Pelatihan Teknis Produksi Benih (APBN) dan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Mandiri Benih (APBD).
 - Pengembangan Padi Organik seluas 200 ha yang tersebar pada kab./kota antara lain yaitu (1) Kab. Tanah Datar (Keltan Batang Kuruak – Nagari Lubuak Jantan Kec. Lintau Buo), (2) Kab. Solok (Keltan Sawah Kandih Maju Bersama – Nagari koto Gaek Guguk Kec. Gunung Talang), (3) Kab. Solok Selatan (Keltan Usaha Bersama – Nagari Alam Pauah Duo Kec. Pauah Duo), (4) Kab. 50 Kota (Keltan Setia Kawan – Nagari Solok Bio-Bio Kec. Harau), (5) Kab. Pesisir Selatan (Keltan Damai Sejahtera – Nagari Gurun Panjang Kec. Bayang), (6) Kab. Padang Pariaman (Keltan Tapian Puti – Nagari Sikabu Kec. Lubuk Alung ; Keltan Kuliek – Kec. Batang Anai ; Keltan



Kayu Kunder – Kec. 2x11 Kayu Tanam), (7) Kab. Agam (Keltan Serumpun Indah – Nagari Candung Koto Laweh Kec. Candung ; Keltan Harapan Baru – Kec. Baso ; Keltan Berkat Yakin – Kec. Baso). masing-masing seluas 20 ha.

- Kegiatan Perbaikan Irigasi Perpipaian/Perpompaan sebanyak 5 (lima) unit di Kab. Pesisir Selatan sebanyak 3 unit, Kab. Sijunjung sebanyak 2 (dua) unit.
- Kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage sebanyak 14 unit yang tersebar di kab./kota yaitu Kab. Pesisir Selatan sebanyak 1 (satu) unit, Kab. Tanah Datar sebanyak 3 (tiga) unit, Solok Selatan sebanyak 4 (empat) unit, Kab. Sijunjung sebanyak 3 (tiga) unit, dan Kab. Pasaman Barat sebanyak 3 (tiga) unit.
- Disamping itu juga ada kegiatan Perluasan Sawah / cetak sawah seluas 331 ha yang tersebar di Kab. Agam seluas 45 ha, Kab. Dharmasraya seluas 115 ha, Kab. Pasaman Barat seluas 80 ha, Kab. Solok Selatan seluas 71 ha.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi (RJIT) 309 unit/kelompok yang tersebar di 12 kab./kota, yaitu Kab. Pasaman Barat (37 unit), 50 Kota (14 unit), Agam (6 unit), Tanah Datar (34 (unit), (Padang Pariaman (51 unit), Solok (36 unit), Solok Selatan (42 unit), Dharmasraya (Pesisir Selatan (56 unit), Kota Padang (15 unit), Solok (11 unit) dan Padang Panjang (1 unit).



- Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Mandiri Benih sebanyak 5 kelompok, berupa Pengadaan Sarana Pelengkap Gudang (Seller, Karung, Gerobak Sorong, Timbangan 10 kg, Lumbo). Pengadaan Bantuan Benih Sumber, Bantuan Sertifikasi. Penangkaran benih unggul asal Sumatera Barat tahun 2017 tersebar pada 6 (enam) kab./kota yaitu Kab. 50 Kota (Keltan Hamparan), Agam (Keltan Binuang Sakti), Tanah Datar (Keltan Saiyo), Sijunjung (Keltan Harapan Jaya), Pesisir Selatan (Keltan Samiun Mandir) dan sawahlunto (Keltan Pulau Sukam).
- Faktor pendukung lain dalam meningkatkan produksi padi adalah semakin lancarnya penyaluran pupuk bersubsidi dengan semakin baiknya system pengawasan pupuk bersubsidi. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari beberapa jenis, Pupuk Urea sebanyak 65.796,70 ton, Pupuk ZA sebanyak 13.164 ton, Pupuk SP36 sebanyak 26.648 ton, NPK sebanyak 69.884 ton, dan Pupuk Organik sebanyak 9.068,18 ton. Untuk harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi adalah HET Urea sebesar Rp.1.800,- per kg dengan volume kemasan 50 kg, HET SP-36 sebesar Rp.2.000,- per kg dengan volume kemasan 50 kg, HET ZA Rp.1.400,- per kg dengan volume kemasan 50 kg, HET NPK sebesar Rp.2.300,- per kg dengan volume kemasan 50 kg dan HET Pupuk Organik Cair sebesar Rp.500,- per kg dengan volume kemasan 40 kg.



- Dalam mendukung peningkatan kegiatan UPSUS tahun 2017 juga ada pendampingan dengan Aparat TNI sebagai turunan dari MoU antara Kementrian Pertanian dengan KESDAM di Jakarta. Untuk Sumatera Barat juga dilakukan pendampingan oleh aparat TNI dalam mendukung UPSUS PAJALE di Provinsi Sumatera Barat dan 19 kab./kota.
- Kegiatan Pengembangan Kawasan Padi dilakukan melalui peningkatan sumberdaya manusia (SDM) baik petani maupun petugas lapangan dalam teknik Sekolah Lapangan, Penangkaran benih, Panen, Pasca panen, Penghitungan rendemen, Losis, Analisa usaha tani dan mutu dan Pembinaan /pendampingan oleh petugas Provinsi ke Kawasan Padi yang telah ditetapkan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah :
 - Pelatihan Teknis Produksi Padi dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 17 – 21 April 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 71 orang. Nara sumber dari UPTD BPSB Provinsi Sumatera Barat. Materi : jenis benih padi, klas benih padi, cara pemilihan bneih padi, budidaya benih padi dan rogging.
 - Pelatihan peningkatan rendemen dan menekan broken dilaksanakan di Padang yang diikuti oleh peserta yang berasal dari kab./kota se Sumatera Barat sebanyak 40 orang.
 - Pelatihan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura yang dilaksanakan di Padang dengan jumlah peserta



sebanyak 40 orang yang berasal dari kab./kota se Sumatera Barat.

Produksi Jagung.

Peningkatan produksi jagung juga didukung oleh kerjasama dengan TNI dalam program UPSUS. Dalam rangka peningkatan produksi jagung didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Jagung. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jagung diprioritaskan di lokasi daerah pengembangan dengan varitas yang diberikan adalah varitas hibrida P 27 dan Bisi 18 pada 7 (tujuh) kabupaten dan 10 kelompok tani, yaitu :

- Varitas Pioner 27 pada 5 (lima) kelompok tani seluas 75 ha dengan kebutuhan benih sebesar 1.125 kg, Urea sebesar 1.000 kg, NPK sebesar 750 kg, 5 alat tanam dan 5 corn seller.
- Varitas Bisi 18 pada 5 (lima) kelompok tani seluas 75 ha dengan kebutuhan benih sebesar 1.125 kg, Urea sebesar 1.000 kg, NPK sebesar 750 kg, 5 alat tanam dan 5 corn seller.

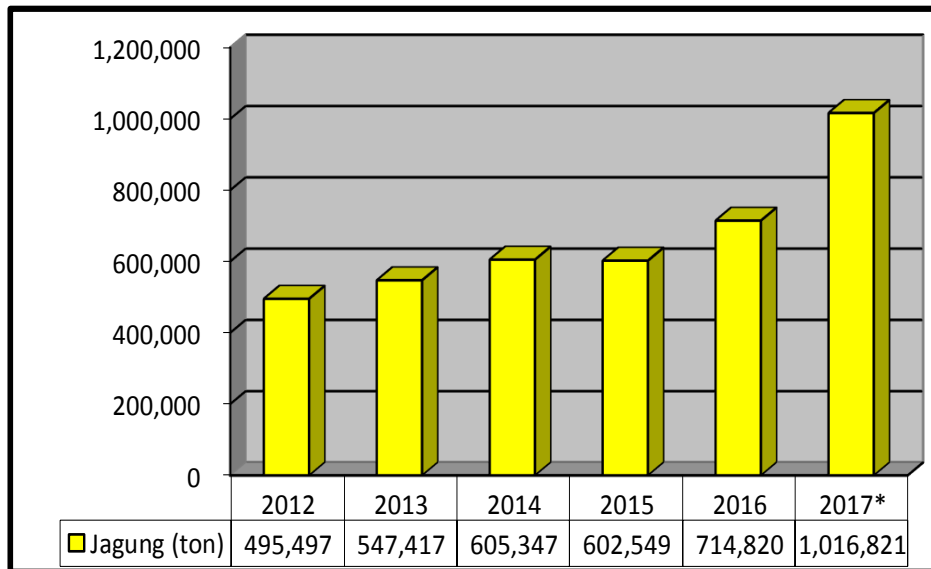
Disamping itu kegiatan Peningkatan produksi jagung didukung oleh kegiatan Pengembangan kawasan jagung melalui peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas terutama melalui bantuan benih unggul dan GPPTT Jagung sebanyak 10 unit/kelompok dengan bantuan benih sebesar 2.250 kg. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.7. Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung



No	Kelompok Tani	Alamat					Unit	Luas (Ha)
		Kabupaten/Kota		Kecamatan		Nagari / Kel		
1	Guguang Indah	1.Pasaman	1	Tigo Nagari	1	Malampah	1	15
2	SP Famili		2	Tigo Nagari	2	Malampah	1	15
3	Tanjung Harapan	2.Pasaman Barat	3	Kinali	3	Kinal	1	15
4	Lubuak Badak		4	Luhak Nan Duo	4	Koto Baru	1	15
5	Masang Jaya	3.Agam	5	Ampek Nagari	5	Ampek Nagari	1	15
6	Wanita Malus	4.Solok Selatan	6	Sangir	6	Lubuk Gadang Timur	1	15
7	Kandis Saiyo	5.Pesisir Selatan	7	Linggo S.B	7	Muaro Kandis	1	15
8	Tunas Harapan		8	Airpura	8	Indra pura	1	15
9	KWT Saiyo	6. 50 Kota	9	Situjuah V Nagari	9	Situjuh Gadang	1	15
10	Ganang Patra	7.Tanah Datar	10	Rambatan	10	Rambatan	1	15
	SUMATERA BARAT						10	150

Untuk lebih jelasnya peningkatan produksi jagung dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3. Perkembangan Produksi Tanaman Jagung di Sumatera Barat

Mulai tahun 2012 kawasan sentra tanaman pangan dan hortikultura telah mencapai 60 kawasan dan pada tahun 2013 diperkuat dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 521/305/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, diantaranya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8 . Kawasan Komoditi Unggulan Tanaman Pangan (Padi dan Jagung) Sumatera Barat

**Kawasan padi : 13 Kawasan**

No	Kawasan	Kabupaten/Kota
1	Kawasan Panti Rao	Kabupaten Pasaman
2	Kawasan Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
3	Kawasan Situjuh	Kabupaten Lima Puluh Kota
4	Kawasan IV Angkat Canduang	Kabupaten Agam
5	Kawasan Lubuak Basung	Kabupaten Agam
6	Kawasan Sungai Tarab	Kabupaten Tanah Datar
7	Kawasan Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
8	Kawasan Gunung Talang	Kabupaten Solok
9	Kawasan Sungai Pagu	Kabupaten Solok Selatan
10	Kawasan Tanjung Gadang	Kabupaten Sijunjung
11	Kawasan Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya
12	Kawasan Lengayang	Kabupaten Pesisir Selatan
13	Kawasan Ranah Pesisir	Kabupaten Pesisir Selatan

Kawasan Jagung : 11 Kawasan

No	Kawasan Jagung	Kabupaten/Kota
1	Kawasan Tigo Nagari	Kabupaten Pasaman
2	Kawasan Rao	Kabupaten Pasaman
3	Kawasan Pasaman	Kabupaten Pasaman Barat



4	Kawasan Lembah Malintang	Kabupaten Pasaman Barat
5	Kawasan Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
6	Kawasan Guguak	Kabupaten Lima Puluh Kota
7	Kawasan Ampek Angkek	Kabupaten Agam
8	Kawasan Rambatan	Kabupaten Tanah Datar
9	Kawasan Sangir	Kabupaten Solok Selatan
10	Kawasan Linggo Sari Baganti	Kabupaten Pesisir Selatan
11	Kawasan Pancung Soal	Kabupaten Pesisir Selatan

Produksi Hortikultura.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja untuk Produksi Hortikultura antara lain adalah Pengembangan Sayuran dan Buah, Pembinaan dan Penanganan serta Pengutuhan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Identifikasi dan Registrasi Kebun Hortikultura.

Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 521/305/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, untuk tanaman hortikultura dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9 . Kawasan Komoditi Unggulan Tanaman Hortikultura Sumatera Barat

**Kawasan Manggis : 12 Kawasan**

No	Kawasan	Kabupaten/Kota
1	Kawasan Bukit Barisan	Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Kawasan Parit Malintang	Kabupaten Padang Pariaman
3	Kawasan Lubuak Tarok	Kabupaten Sijunjung
4	Kawasan Bawan	Kabupaten Agam
5	Kawasan Palembayan	Kabupaten Agam
6	Kawasan Kamang	Kabupaten Agam
7	Kawasan Sangir	Kabupaten Solok Selatan
8	Kawasan Pakan Rabaa	Kabupaten Solok Selatan
9	Kawawsan Linggo Sari Baganti	Kabupaten Pesisir Selatan
10	Kawasan Sutera	Kabupaten Pesisir Selatan
11	Kawasan Lengayang	Kabupaten Pesisir Selatan
12	Kawasan Pauh	Kota Padang

Kawasan Sayuran : 12 Kawasan

No	Kawasan	Kabupaten/Kota
1	Kawasan Banuhampu Sei Pua	Kabupaten Agam
2	Kawasan Alahan Panjang	Kabupaten Solok

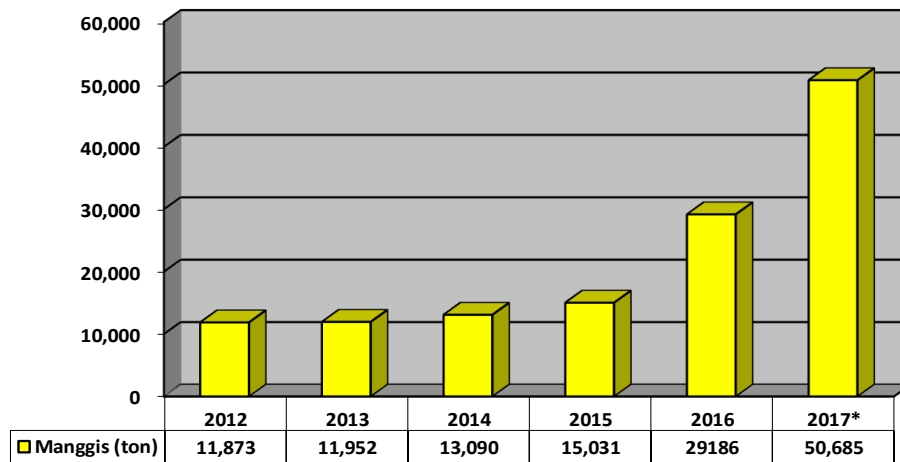


3	Kawasan Danau Kembar	Kabupaten Solok
4	Kawasan Salimpaung	Kabupaten Tanah Datar
5	Kawasan X Koto	Kabupaten Tanah Datar

Untuk mencapai target pada indikator kinerja dari sasaran ini terdapat 2 program yang bersumber dari dana APBD Provinsi yaitu 1) Pengembangan kawasan sentra produksi Pertanian, dan 2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas ; dan dana APBN melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan (Satker 04).

❖ **Produksi Manggis.**

Perkembangan produksi manggis juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 terdapat peningkatan produksi sebesar 10,69% (1.270 ton), tahun 2013 meningkat sebesar 0,66% atau sebesar 79 ton, tahun 2014 meningkat sebesar 8,69% (1.138 ton) dan pada tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 12,91 % (1.941 ton). Tahun 2017 angka sementara produksi manggis sebesar 50.685 ton, meningkat sebesar 27.396 ton dari tahun 2016.

Grafik 4. Perkembangan Produksi Tanaman Manggis di Sumatera Barat

Peningkatan produksi manggis disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 di daerah sentra produksi manggis, antara lain :

- Sekolah Lapangan Good Agriculture Practices (SL GAP) Manggis sebanyak 8 kali/kelompok tani yang dilaksanakan di 8 kab./kota yaitu Kab. Agam, Sijunjung, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Tanah Datar dan Kota Padang.
- Pendampingan / pemandu oleh penyuluh + PHP setempat
- Pembinaan yang terus menerus dari Dinas provinsi dan instansi terkait.
- Identifikasi dan registrasi lahan/kebun manggis



❖ **Produksi Cabe**

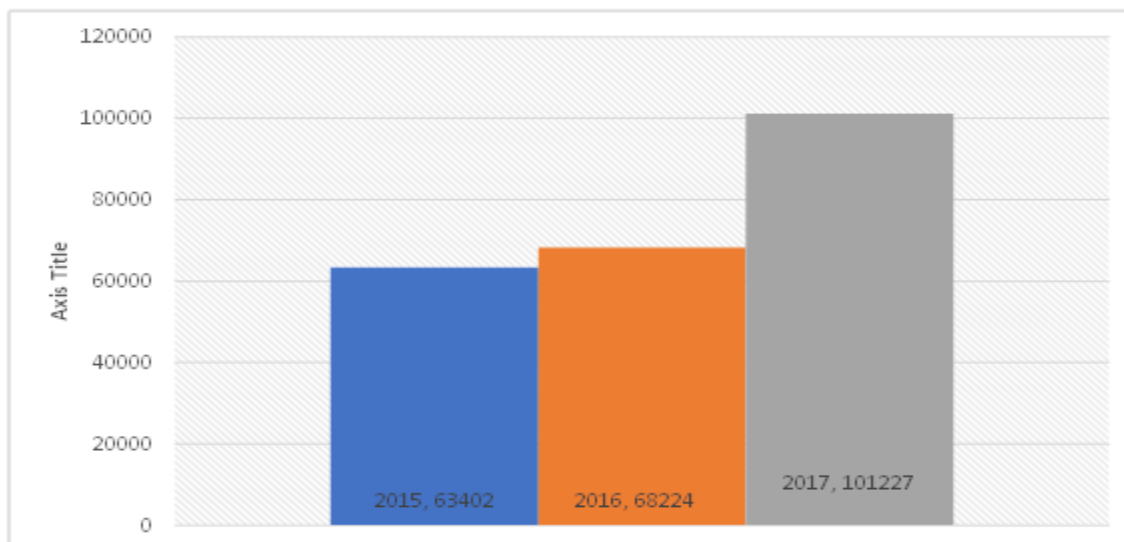
Dibanding dengan tahun 2016 di tahun 2017 terjadi peningkatan produksi sebesar 48 %, hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan antara lain :

- Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura melalui kegiatan Kawasan Aneka Cabai (Dana Tugas Pembantuan Provinsi Satker Hortikutura (04)) seluas 220 Ha, yang dilaksanakan di Kab. Tanah Datar seluas 40 ha, Solok Selatan seluas 25 ha, 50 Kota seluas 50 ha, Pasaman Barat seluas 25 ha, Kota Padang Panjang seluas 20 ha, Kota Padang seluas 20 ha, Kota Payakumbuh seluas 20 ha dan Kab. Sijunjung 20 ha.
- Peningkatan produksi cabe juga ditunjang dengan adanya kegiatan pengembangan Kawasan Aneka Cabai dari Dana Tugas Pembantuan Satker (04) Mandiri di Kabupaten yang berlokasi di Kab Solok seluas 35 ha, Agam seluas 75 ha, dan Pesisir Selatan seluas 40 ha.
- Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pengembangan cabe di daerah penyangga yang diberikan bantuan berupa bibit, pupuk dan mulsa plastik ikut berperan dalam pengembangan budidaya cabe dan peningkatan produksi cabe.
- Naiknya harga cabe sehingga meningkatkan minat petani untuk menanam cabe.



- Adanya beberapa Kegiatan APBD seperti di kab Agam Gerakan Perluasan Tanam Cabe Merah seluas 45 Ha berupa Bantuan Benih Unggul Cabe seluas 45 ha.
 - Program Agam menyemai yang dicanangkan oleh Bupati Agam .
 - Kegiatan Sekolah Lapang (SL) Cabe di Kab Sijunjung seluas 5 Ha, dan di kab Solok Selatan seluas 5 Ha.
 - Di Kab Tanah Datar ada Sekolah Lapangan Good Agriculture (SL GAP) Cabe.
 - Program Pengembangan Kawasan Cabe (APBN) dan Cluster Bank Indonesia (BI) dengan 13 bantuan yang merupakan paket lengkap.
- Untuk lebih jelasnya peningkatan produksi cabe setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 5 : Perkembangan Produksi Tanaman Cabe di Sumatera Barat tahun 2015 s/d 2017





❖ **Produksi Bawang Merah**

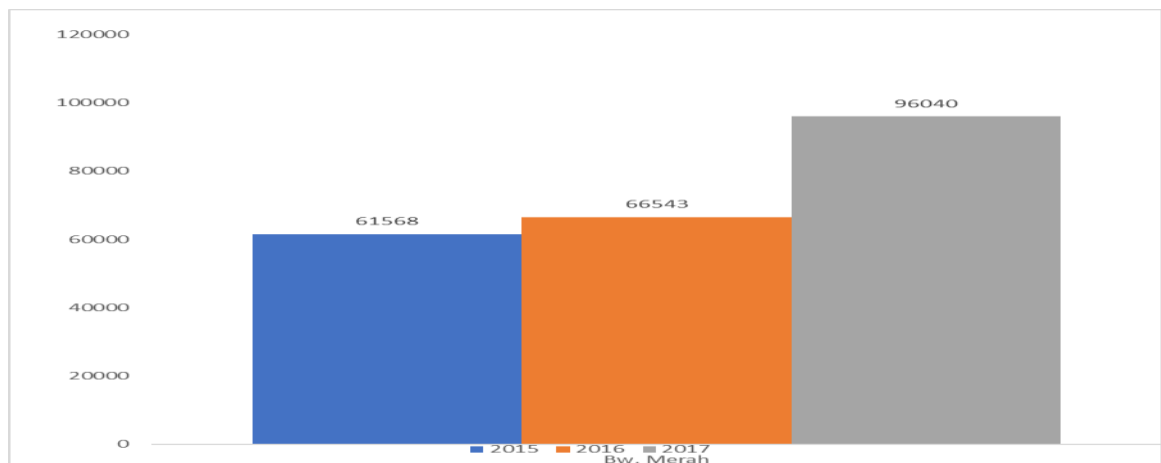
Dibanding dengan tahun 2016 di tahun 2017 terjadi peningkatan produksi sebesar 44 %, hal ini disebabkan adanya kenaikan luas tanam bawang merah yang disebabkan oleh beberapa kegiatan antara lain :

- Meningkatnya budidaya bawang merah disebabkan adanya kegiatan Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Dana Tugas Pembantuan Provinsi Satker (04) (TP-04), Pengembangan Kawasan Bawang Merah yang berlokasi di Kab. Solok seluas 125 ha, Agam seluas 30 ha, Pesisir Selatan seluas 70 ha, Tanah Datar seluas 10 ha dan Solok Selatan seluas 40 ha.
- Kegiatan Produksi Benih Bawang Merah di UPTD BBI TPPH sebanyak 12.000 kg mampu meningkatkan ketersediaan benih bawang.
- Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura mampu menekan pertumbuhan OPT sehingga produksi meningkat.
- Adanya kegiatan APBD Kabupaten yaitu program penanaman bawang merah seluas 10 ha sehingga minat petani juga meningkat dan melanjutkan secara swadaya.
- Di Kab. Agam peningkatan luas tanam sebesar 30 ha karena adanya program pengembangan bawang merah dan bantuan bibit unggul

bawang seperti varietas Maja Cipanas di Tilatang Kamang, Magek dan Ampek Angkek Canduang dan varietas Bima Brebes di Lubuk Basung, Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara. Untuk lebih jelasnya peningkatan produksi bawang merah dapat dilihat ada grafik di bawah ini.

- Selain faktor yang diatas juga didukung adanya kegiatan perbanyakan benih oleh BBI sehingga ketersediaan benih bermutu untuk kebutuhan petani dapat dipenuhi.

Grafik 6 : Perkembangan Produksi Tanaman Bawang Merah di Sumatera Barat



Komoditi Perkebunan

Komoditi perkebunan juga masuk kedalam Sasaran strategis dinas yang harus dipenuhi target pencapaiannya. Dibawah ini adalah Tabel Capaian produksi (ton) komoditi perkebunan Kopi, Sawit, Kakao dan Karet tahun



2017. Indikator kinerja, target, realisasi dan capaian dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10. : Indikator Kinerja,Target, Realisasi dan Capaian dari Sasaran
Meningkatnya produksi tanaman perkebunan Tahun 2017 (Ton)

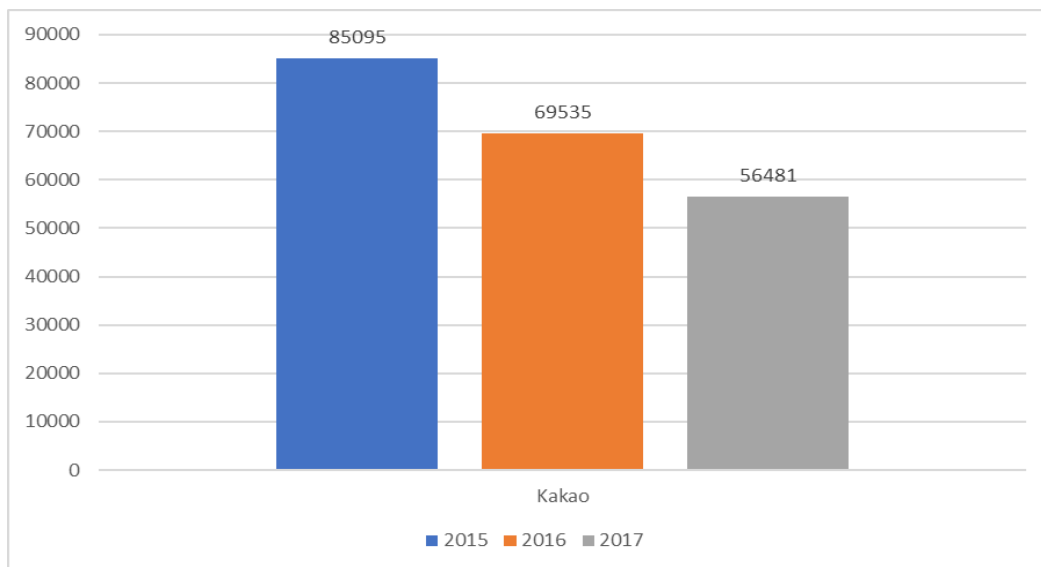
No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)			
	Komoditi Kakao	13,5	-18,77	339,04
	Komoditi Karet	2,97	3,04	102,37
	Komoditi Kelapa Sawit	3,85	4,08	105,97
	Komoditi Kopi Arabika	7,13	-9,98	339,97

Berdasarkan tabel di atas, ternyata persentase capaian realisasi terhadap indikator kinerja peningkatan produksi tanaman perkebunan tahun 2017 adalah komoditi kakao sebesar 339,04 % , karet sebesar 102,37 % , kelapa sawit sebesar 105,97 % dan Kopi sebesar 339,97 %.

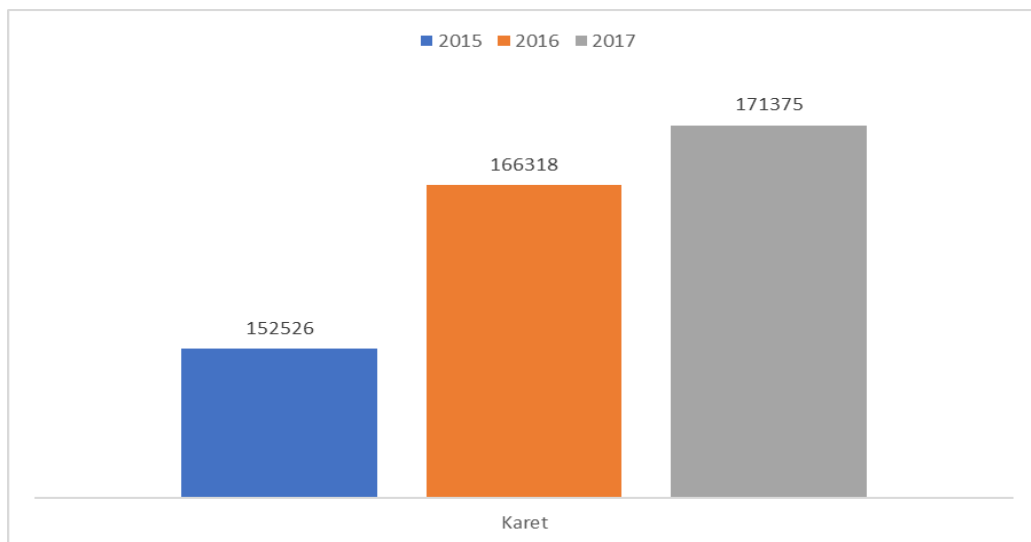
Perkembangan produksi tanaman Kakao, Karet, Kelapa Sawit dan Kopi di Sumatera Barat tahun 2015 s/d 2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



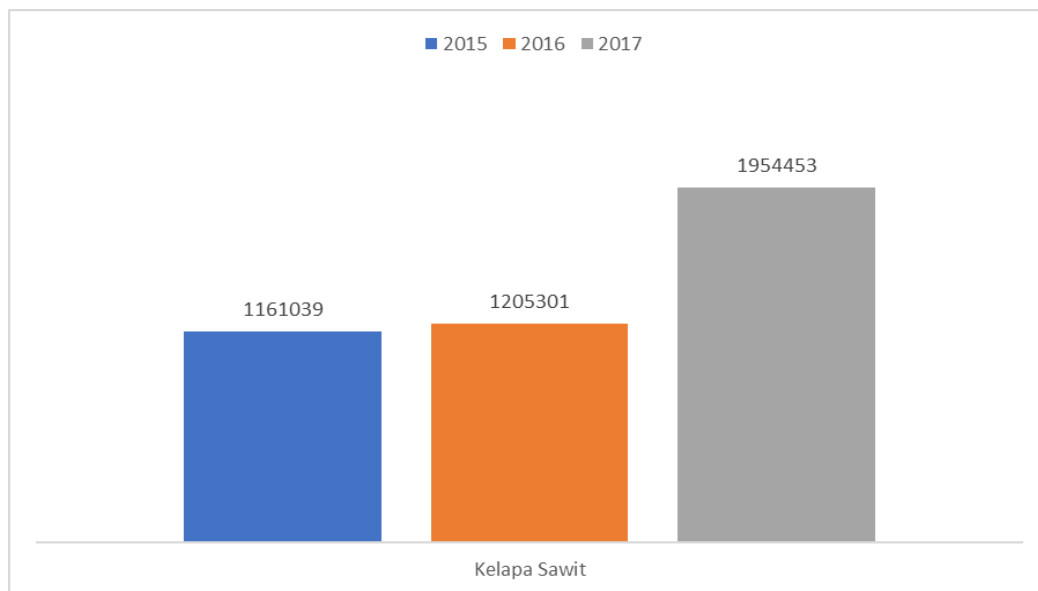
Grafik 7 : Perkembangan Produksi Tanaman Kakao di Sumatera Barat



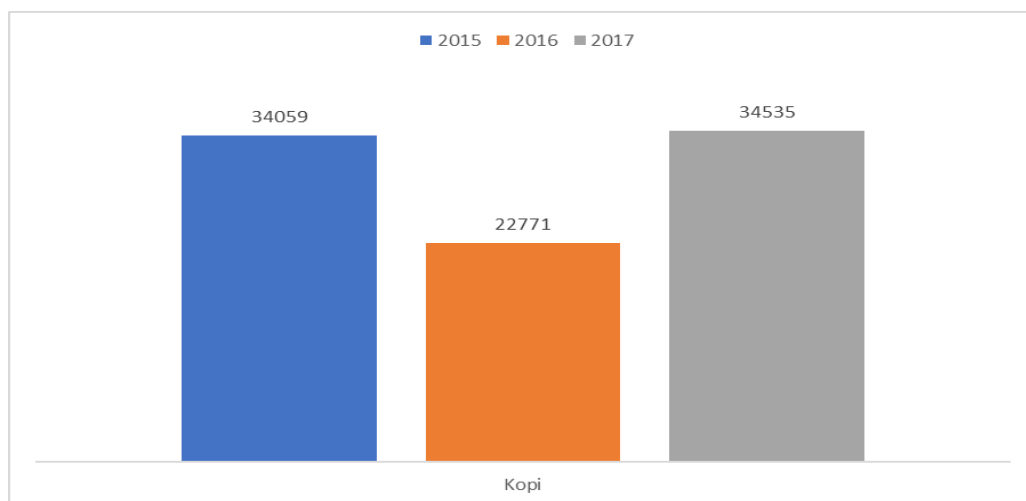
Grafik 8 : Perkembangan Produksi Tanaman Karet di Sumatera Barat



Grafik 9 : Perkembangan Produksi Tanaman Kelapa Sawit di Sumatera Barat



Grafik 10 : Perkembangan Produksi Tanaman Kopi di Sumatera Barat



B. Meningkatnya Sarana dan Prasana Pertanian



Persentase Target, Realisasi dan Capaian Realisasi Indikator kinerja
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertanian pada sasaran strategis ini
adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.11 : Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja, dan Sasaran
Strategis Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Realisasi capaian %
1	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Pertanian	a	Penggunaan Alsintan	Unit	1.215	1.215	100
		b	Penyaluran Pupuk	Ton	65.600	65.600	100
		- Urea			25.274	25.274	100
		- SP36			15.588	15.588	100
		- ZA			50.300	50.300	100
		- NPK			14.820	14.820	100
		-Organik					

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yang merupakan unsur-unsur yang penting dalam hal berkembangnya sarana dan prasarana pertanian yaitu penggunaan alsintan dan penyaluran pupuk.



Penggunaan Alsintan yang memenuhi standar baik alsintan prapanen maupun alsintan pasca panen, merupakan salah satu teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Pada tahun 2017 dilaksanakan berbagai kegiatan untuk berkembangnya penggunaan alsintan yang bermutu yaitu :

- a. Pengembangan Alsintan Dan Bengkel Keliling, yang dalam pelaksanaannya terdiri dari : Pertemuan Koordinasi sebanyak 2 (dua) kali, Pelatihan Audit Internal Lab. Uji Alsintan sebanyak 5 Kali, Tersedianya Suku cadang. Pengujian Alat Mesin Pertanian dilaksanakan pada bengkel-bengkel pengrajin alsintan di Sumatera Barat.
- b. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Alsintan dengan hasil meningkatnya kapasitas kelembagaan dan usaha pertanian dengan terlatihnya Operator Alsintan Kab./kota sebanyak 250 orang

Pada tahun 2017 disalurkan alat mesin pertanian untuk alokasi Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.215 Unit dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12. : Penyaluran Alat Mesin Pertanian tahun 2017

No	Uraian	Vol	sat
A	Provinsi Sumatera Barat		
	- Bantuan alat tanam jagung dorong	100	UNIT
	- Bantuan alat tanam jagung Tarik	3	UNIT
	- Traktor Roda 4	5	UNIT



	- Traktor Roda 2 Type Rotary (10,5 PK)	10	UNIT
	- Traktor Roda 2 Type Singkal (6,5 PK)	40	UNIT
	- Pompa Air (3 inchi)	45	UNIT
B	Kabupaten Lima Puluh Koto		
	- Traktor Roda 2	10	UNIT
	- Pompa Air	18	UNIT
	- Rice Transplanter	2	UNIT
	- Hand Sprayer	51	UNIT
C	Kabupaten Agam		
	- Traktor Roda 2	33	UNIT
	- Pompa Air	15	UNIT
	- Rice Transplanter	2	UNIT
	- Cultivator	2	UNIT
	- Hand Sprayer	64	UNIT
E	Kabupaten Padang Pariaman		
	- Traktor Roda 2	8	UNIT
	- Pompa Air	17	UNIT
	- Rice Transplanter	2	UNIT
	- Cultivator	3	UNIT
	- Hand Sprayer	56	UNIT
	Kabupaten Pasaman		



F			
	- Traktor Roda 2	7	UNIT
	- Pompa Air	16	UNIT
	- Rice Transplanter	2	UNIT
	- Hand Sprayer	50	UNIT
G	Kabupaten Pesisir Selatan		
	- Traktor Roda 2	37	UNIT
	- Pompa Air	12	UNIT
	- Rice Transplanter	3	UNIT
	- Cultivator	3	UNIT
	- Hand Sprayer	57	UNIT
H	Kabupaten Solok		
	- Traktor Roda 2	40	UNIT
	- Pompa Air	10	UNIT
	- Rice Transplanter	3	UNIT
	- Hand Sprayer	64	UNIT
I	Kabupaten Tanah Datar		
	- Traktor Roda 2	27	UNIT
	- Pompa Air	10	UNIT
	- Hand Sprayer	50	UNIT
J	Kabupaten Kota Bukittinggi		



	- Traktor Roda 2	3	UNIT
	- Pompa Air	2	UNIT
	- Hand Sprayer	1	UNIT
K	Kabupaten Kota Padang Panjang		
	- Hand Sprayer	2	UNIT
L	Kabupaten Kota Padang		
	- Traktor Roda 2	8	UNIT
	- Pompa Air	5	UNIT
	- Hand Sprayer	16	UNIT
M	Kabupaten Kota Payakumbuh		
	- Pompa Air	2	UNIT
	- Hand Sprayer	7	UNIT
N	Kabupaten Kota Sawah Lunto		
	- Traktor Roda 2	14	UNIT
	- Pompa Air	15	UNIT
	- Hand Sprayer	2	UNIT
O	Kabupaten Kota Solok		
	- Traktor Roda 2	10	UNIT



	- Hand Sprayer	2	UNIT
P	Kabupaten Kota Pariaman		
	- Pompa Air	2	UNIT
	- Rice Transplanter	2	UNIT
	- Hand Sprayer	5	UNIT
Q	Kabupaten Dharmasraya		
	- Traktor Roda 2	34	UNIT
	- Pompa Air	11	UNIT
	- Rice Transplanter	3	UNIT
	- Hand Sprayer	13	UNIT
R	Kabupaten Solok Selatan		
	- Traktor Roda 2	25	UNIT
	- Pompa Air	7	UNIT
	- Rice Transplanter	4	UNIT
	- Cultivator	3	UNIT
	- Hand Sprayer	27	UNIT
S	Kabupaten Pasaman Barat		
	- Traktor Roda 2	20	UNIT
	- Pompa Air	10	UNIT
	- Rice Transplanter	2	UNIT



	- Cultivator	2	UNIT
	- Hand Sprayer	27	UNIT
T	Kabupaten Sijunjung		
	- Traktor Roda 2	24	UNIT
	- Pompa Air	8	UNIT
	- Rice Transplanter	3	UNIT
	- Hand Sprayer	17	UNIT

Pupuk merupakan sarana yang sangat penting dalam melaksanakan usahatani. Penyaluran pupuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521.4/14924/Kpts-DISTANHORBUN/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian pada Kab./Kota di Provinsi Sumatera Barat TA. 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.13. : Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sumatera Barat

No	Kab./Kota	UREA	ZA	SP36	NPK	ORGANIK
1	Kab. Pasaman	7.327,65	122	1.524	4.077	224,6
2	Kab. Pasbar	12.095,2	3.705	4.108	10.721	664,96
3	Kab. 50 Kota	5.083,05	637	1.917	5.012	871,8
4	Kab. Agam	6.976,15	1.100	3.100	6.889	755,88



5	Kab. Tanah Datar	5.344,05	1.389	2.695	8.398	1.604,4
6	Kab. Pdg. Pariaman	5.396,3	676	1.777	6.806	219
7	Kab. Solok	4.560	1.300	5.000	8.573	2.091,72
8	Kab. Solsel	3.820,15	461	1.610	3.186	1.008,44
9	Kab. Sijunjung	920	340	505	1.300	19
10	Kab. Dharmasraya	4.764	1.013	1.363	4.300	592
11	Kab. Pessel	6.036,45	1.996	2.268	7.069	630
12	Kep. Mentawai	-	-	-	-	-
13	Kota Payakumbuh	1.216	141	338	1.180	163
14	Kota Bukittinggi	124,5	1	7	25	-
15	Kota Padang Panjang	118	2	27	55	17
16	Kota Padang	1.248	198	162	1.375	157,38
17	Kota Solok	149,9	1	50	200	20
18	Kota Sawahlunto	67,3	1	27	95	-
19	Kota Pariaman	550	81	170	618	26
	SUMATERA BARAT	65.796,7	13.164	26.648	69.884	9.068,18

C. Meminimalkan Luas Serangan yang Disebabkan oleh Serangan OPT dan Bencana Alam



Indikator sasaran selanjutnya adalah menurunnya luas serangan hama dan penyakit tanaman baik tanaman pangan (padi) dan perkebunan. Target persentase menurunnya luas serangan OPT tanaman padi sebesar 0,6 % dan sebesar 1 % untuk tanaman perkebunan. Target tersebut dibuat berdasarkan perkiraan luas serangan OPT di lapangan dengan luas areal pertanaman dikalikan seratus persen.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi jumlah luas serangan OPT dari beberapa komoditi unggulan di provinsi sumatera barat tahun 2017 .

Tabel. 3.14. : Tabel Luas Serangan OPT dan Luas Pertanaman Komoditi Unggulan di Sumatera Barat 2017

NO	KOMODITI	LUAS SERANGAN OPT		Luas Tanaman
		Satuan	Jumlah Serangan	
1	Padi	Ha	2.366	549.890
4	Jagung	Ha	123	156.368,7
5	Manggis	Ha	608	573
6	Bawang Merah	Ha	309	9.716
8	Cabe	Ha	472	9.654
	Jumlah	Ha	3.878	726.201,7

Berdasarkan realisasi luas serangan OPT terhadap tanaman pangan dan hortikultura seluas 3.878 ha. Bila dibandingkan dengan luas pertanaman yang terdapat di lapangan (726.201,7 ha) ternyata serangan hama sebesar = (3.878



/ 726.201,7) x 100 % = 0,53 % . Berarti tingkat capaian keberhasilannya mencapai = $(((2 \times 0,6) - (0,53)) / 0,6) \times 100 \% = 111,6 \%$

Tabel. 3.15 : Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meminimalkan luas serangan yang disebabkan oleh serangan OPT dan bencana alam	Menurunnya luas serangan hama dan penyakit tanaman (%)	%	0,6	0,53	111,6

Tabel 3.16 : Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi Tahun					Capaian Kinerja Capaian Kinerja (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Menurunnya luas serangan hama dan penyakit tanaman (%)	1	0,69	0,5	0,6	0,53	100	131	150	140	111,6



Berdasarkan data diatas diperoleh gambaran bahwa rendahnya serangan hama atau berhasilnya upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan perlindungan tanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Hal ini akan menguntungkan kepada petani dimana dengan rendahnya serangan hama akan berdampak baik bagi hasil produksi pertanian.

Pada Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mendukung yaitu : Peningkatan Perlindungan Tanaman, Fasilitasi Sarana Brigade dan Pengendalian Serangan OPT dan Pengawasan Mutu Standar Pestisida.

D. MENINGKATNYA KUALITAS SDM PENYULUHAN

Penyuluh merupakan ujung tombak pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Berbagai program dan kegiatan dapat sampai ke pelaku utama ataupun pelaku usaha (petani dan nelayan) hanya dapat dilakukan melalui penyuluh. Posisi penyuluh menjadi sangat penting untuk mewujudkan pembangunan dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Terkait dengan sasaran diatas, kualitas SDM penyuluh akan sangat menentukan sehingga persentase dari SDM penyuluh yang sesuai kompetensinya menjadi salah satu ukuran dalam keberhasilan. Persentase SDM penyuluh yang sudah sesuai kompetensinya bisa diukur dari jumlah penyuluh sudah lulus sertifikasi dan juga jumlah SDM yang mengikuti berbagai bimtek, temu-temu teknis penyuluhan dan workshop dalam rangka meningkatkan kapasitas penyuluh.



Program kegiatan ini didukung oleh dana APBD Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM melalui 3 kegiatan yaitu Pembinaan dan peningkatan SDM Penyuluhan pertanian, Pembinaan dan peningkatan SDM Penyuluhan perikanan dan peternakan serta Pembinaan dan peningkatan SDM Penyuluhan Kehutanan perkebunan. Walaupun sebenarnya terjadi keterbatasan dana pada APBD namun dukungan dana dari Kementerian memberikan support yang terwujudnya

Tabel 3.17 Jumlah SDM Penyuluh yang mendapat fasilitasi Bimtek/pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya

No	Jenis Fasilitas	Satuan	2017
1	Temu Teknis Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota	Orang	1250
2	Workshop Pengembangan Profesi Penyuluh Pertanian	Orang	35
3	Temu Teknologi Penyuluh Pertanian dan Peneliti	Orang	40
4	Temu Teknis	Orang	80
5	Temu Koordinasi THL TBPP	Orang	45
6	Temu tugas Penyuluh Pertanian	Orang	40
7	Temu Evaluasi Kinerja THL	Orang	45
	Jumlah	Orang	1535



Dari tabel di atas terlihat jumlah penyuluh yang mendapatkan Peningkatan Pembinaan SDM yang artinya penyuluh tersebut telah memenuhi standar kompetensi yang di persyaratkan oleh lembaga sertifikasi nasional. Hal ini sangat mendukung sumber daya manusia Sumatera Barat dalam menyikapi persaingan tenaga kerja era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga mampu menjadi tenaga kerja yang handal di negeri sendiri. Sementara yang mengikuti Bimtek, temu teknis, temu teknologi, dan workshop pengembangan profesi penyuluh tersebut telah memiliki peningkatan kapasitas SDM yang dibutuhkan untuk memberikan pembinaan. Bimbingan dan pendampingan terhadap petani dan nelayan dalam mengembangkan usaha taninya, tentu saja dalam rangka mendukung pemerintah untuk mewujudkan kehidupan petani dan nelayan yang lebih sejahtera sebagaimana tertuang dalam Nawacita Pemerintah Jokowi Widodo dan Yusuf Kala.

Permasalahan :

1. Masih belum seimbang penyebaran penyuluh baik berdasarkan sub sektor (pertanian, perikanan dan kehutanan) maupun wilayah kerja.
2. Masih kurangnya jumlah penyuluh dibandingkan dengan jumlah pelaku utama/pelaku usaha

Solusi :

1. Perlunya penambahan jumlah penyuluh di sektor perikanan dan terutama kehutanan baik dengan perekrutan penyuluh baru/kontrak ataupun dengan pengembalian perekrutan penyuluh yang berpindah ke struktural.



2. Pengangkatan petani menjadi penyuluh swadaya yang difasilitasi oleh daerah
3. Perlunya dilakukan pendataan ulang penyuluh dan penempatan penyuluh yang merata di setiap daerah sesuai dengan beban kerjanya.
4. Perlunya peningkatan kompetensi penyuluh melalui diklat/ bimtek/ pertemuan/ pelatihan sehingga seorang penyuluh tidak hanya menguasai bidang tugas spesifikasinya saja tetapi juga bidang lain secara umum sehingga dapat menjawab kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha di lapangan.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Nilai Tambah Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah jumlah yang sudah ada standarisasi dan Jumlah Kelompok Olahan yang sudah melakukan Proses pengolahan.

Tabel. 3.18 : Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditi Pertanian Tanaman	Jumlah Produk yang sudah ada standarisasi :	Buah	10	18	180
		Jumlah Kelompok Tani yang sudah	Keltan	15	15	100



	Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Melakukan Proses pengolahan				
--	---	-----------------------------------	--	--	--	--

Penentuan capaian target kinerja ini disusun berdasarkan target yang telah ada pada renstra yaitu sebanyak 10 produk /thn dan dibandingkan sampai tahun 2017, sebanyak 18 Produk/thn berarti persentase capaian kinerja = $(18/10) \times 100\% = 180\%$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19 : Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi Tahun					Capaian Kinerja (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah produk olahan pertanian yg sudah standarisasi (produk/thn)	5	10	10,34	10	18	100	100	100	150	180
2	Jumlah Kelompok tani yang sudah			15							



	melakukan pengolahan	15	20		15	15	100	100	100	100	100
--	-------------------------	----	----	--	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Adapun jumlah produk olahan pertanian yang sudah standarisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pisang Karamel
2. Kue Bawang / kripik pisang
3. Kripik Talas
4. Randang Paku, Aluo Sipuluik
5. Kerupuk Stik Ubi Jalar Ungu
6. Kue Pilin
7. Rendang Ubi
8. Sarang Balam
9. Aneka Dendeng Sayuran
10. Pias Kacang
11. Keripik Pisang, Kripik Serundeng Pisang Balado
12. Dendeng Daun Pisang, Dendeng Jantung Pisang
13. Dendeng Daun Pepaya
14. Pilus Kentang
15. Ladu Arai Pinang
16. Jahe Instan
17. Bolu Pisang Roti
18. Talas Bambu

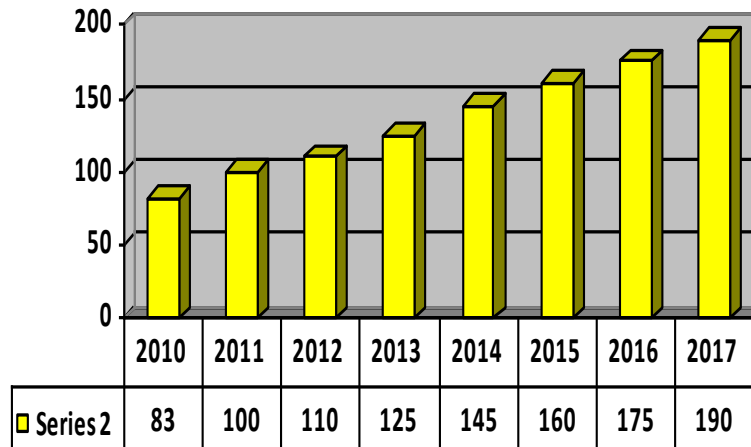


Program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil, yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
2. Promosi Pemasaran Hasil Pertanian dan Penyebaran Informasi Pasar
3. Lomba Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Pengembangan dan Peningkatan SDM Kelompok Pengolahan Hasil serta Nilai Tambah Produk Pertanian
5. Peningkatan Mutu Produk Olahan Kelompok Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP)
6. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Produk Olahan Pertanian Secara Terpadu
7. Sertifikasi Pangan dan Pemasyarakatan Pertanian Organik.

Jumlah kelompok pengolahan hasil tahun 2017 bertambah sebanyak 15 kelompok tani. Kelompok tani yang sudah mendapat sertifikasi Halal food tahun 2017 bertambah sebanyak 15 Kelompok, berarti persentase capaian jumlah kelompok adalah $= (15/15) \times 100 \% = 100 \%$.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing produk TPH melalui agroindustri pedesaan adalah berupa pengolahan hasil pertanian yakni dengan mengembangkan **“Unit Pelayanan Pengembangan dan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) “** yang berorientasi mutu dan pembinaan manajemen dalam proses berproduksi.

**Grafik 11. Peningkatan Jumlah UP3HP (klpk) di Sumatera Barat**

Sampai tahun 2017 terdapat 190 unit kelompok UP3HP tersebar di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan yang difasilitasi dengan peralatan pengolahan tahin 2017 sebanyak 15 unit UP3HP yaitu :

1. Kelompok UP3HP Nabila Bersaudara – Kab. Pasaman
2. Kelompok UP3HP Permata Bunda – Kab. Pasaman
3. Kelompok UP3HP Harapan Baru – Kab. Pasaman
4. Kelompok UP3HP Mudiak Timaran (Muti) Kab. Pasaman
5. Kelompok UP3HP Pertiwi – Kab. Pasaman Barat
6. Kelompok UP3HP Tujuh Koto Lestari – Kab. Lima Puluh Kota
7. Kelompok UP3HP Maju Sejahtera – Kab. Lima Puluh Kota
8. Kelompok UP3HP Simpang Koto – Kab. Lima Puluh Kota
9. Kelompok UP3HP KPE Gapoktan Situ Banda – Kab. Lima Puluh Kota
10. Kelompok UP3HP Tani Campago – Kab. Lima Puluh Kota



11. Kelompok UP3HP KWT Bengke Sakato - Kab. Padang Pariaman
12. Kelompok UP3HP KWT Kampung Tengah – Kab. Padang Pariaman
13. Kelompok UP3HP KWT Anugrah Palapa Saiyo – Kab. Padang Pariaman
14. Kelompok UP3HP KWT Batu Tapo – Kab. Padang Pariaman
15. Kelompok UP3HP Kalodan Prima – Kab. Padang Pariaman

Diharapkan kelompok-kelompok tersebut berkembang dengan baik, dapat menjadi motivator/pendorong bagi kelompok/ pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.

Untuk memperbaiki mutu produk pertanian agar dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional telah dilaksanakan cara-cara penanganan pascapanen dan pengolahan yang baik yang saat ini dikenal dengan istilah Good Handling Practices (GHP) dan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), Cara-cara tersebut merupakan aspek yang penting untuk meningkatkan mutu produk pertanian.

Dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk peningkatan nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura maka berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa telah semakin berkembangnya unit usaha pengolahan produk hasil pertanian dengan bertambahnya jenis produk olahan yang terdapat di pasaran.

3. Sasaran Strategis 3 (Berkembangnya Pertanian Organik)

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah Bertambahnya Luasan Pertanian Organik dengan target 200 Ha. Penentuan target indikator ini adalah berdasarkan pada Renstra dengan melihat luas daerah pertanian organik yang ada di Sumatera Barat dan pertimbangan anggaran.

Realisasi pada tahun 2017 adalah 200 ha, berarti capaian kinerja sebesar = $(200/200) \times 100\% = 100\%$. Target ini sepenuhnya tercapai karena dipengaruhi oleh kondisi lapangan. Namun jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya ada terdapat peningkatan luasan pertanian organik. Dari evaluasi yang dilaksanakan maka diperoleh gambaran bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.20 : Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 3

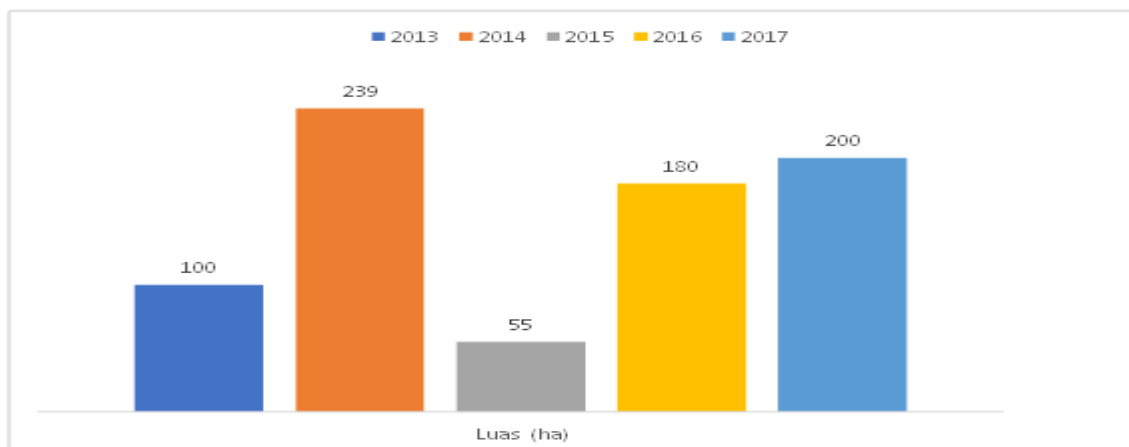
No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Berkembangnya pertanian organik	Bertambahnya luasan pertanian organik (Ha/th)	Ha	200	200	100

Realisasi luasan pertanian organik di Sumatera Barat dari tahun 2013 sampai 2017 seperti tabel di bawah ini.

Tabel. 3.21. : Realisasi Luasan Pertanian Organik di Sumatera Barat dari tahun 2013 s/d 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bertambahnya luasan pertanian organik (Ha/th)	100	239	55	180	200

Grafik 12. : Perkembangan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3



Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil dengan kegiatan Sertifikasi Pangan dan Pemasyarakatan Pertanian Organik.

Kegiatan pemasyarakatan pertanian organik merupakan upaya mengubah pola tani yang biasanya menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan menjadi pertanian organik yang ramah lingkungan. Untuk mencapai target



kinerja diatas, Pada tahun 2017 dilaksanakan SLAPO pada 2 kelompok tani yang masing masing kelompok terdiri dari 10 orang petani yaitu :

1. Kelompok tani Sago Putri di Jorong Madang Kadok Nagari sungai kamuyang Kec. Luak Kab. Limapuluh Kota
2. Kelompok tani Tunas baru nagari pancuang taba Kec. Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan

Selain itu juga dilakukan Kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik dan Pemasyarakatan Pertanian Organik yang dilaksanakan pada kelompok tani, yaitu :

1. Kelompok Damai Sejahtera - Kec. Bayang , Kab. Pesisir Selatan
2. Kelompok Sarumpun Indah – Kec. Candung , Kab. Agam
3. Kelompok Tani Harapan Baru - Kec. Baso, Kab. Agam
4. Keltan Berkat Yakin – Kec. Baso, Kab. Agam
5. Keltan Setia Kawan – Kec. Harau , Kab. 50 Kota
6. Keltan Tapian Padi – Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman
7. Keltan Kayu Kundur–Kec. 2x11 Kayu Tanam, Kab. Pdg.Piaman.
8. Keltan S.K. Maju Bersama – Kec. Gn.Talang, Kab. Solok
9. Keltan Usaha Bersama – Kec. Pauah Duo, Kab. Solse
10. Keltan Batang Kurunak – Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar.

Kegiatan pemasyarakatan pertanian organik merupakan upaya mengubah pola tani yang biasanya menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan



menjadi pertanian organik yang ramah lingkungan. Untuk mencapai target kinerja diatas, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Sekolah Lapang Pertanian Organik sebanyak 5 unit.
2. Demplot Sayur sebanyak 2 unit.
3. Pusat Studi Pertanian Organik dilaksanakan di 1 unit.
4. Fasilitasi Pengembangan Pertanian Organik 2 unit
5. Pelatihan Lapangan Sertifikasi Organik sebanyak 3 Unit.

Dengan adanya pelatihan lapangan persiapan sertifikasi organik dan pembinaan kepada kelompok tani organik telah diterbitkan 11 (sebelas) sertifikat pertanian organik kelompok tani, seperti tabel dibawah ini .

Tabel 3.22. Data Sertifikat Organik KelompokTani tahun 2017 di Sumatera Barat

No	No. Register	Tgl. Register	Keltan	Kab./Kota
1	Reg.034/LSO-SB/2017	28 – 11 - 2017	Organik Mandiri	Tanah Datar
2	Reg.011/LSO-SB/2017	03 – 11 - 2017	Organik Gapisa	Tanah Datar
3	Reg.002/LSO-SB/2017	02 – 12 - 2017	Lurah Sepakat	Agam
4	Reg.032/LSO-SB/2017	28 – 11 - 2017	Sahabat Tani	Padg Pariaman
5	Reg.054/LSO-SB/2017	12 – 10 - 2017	Alnajmi Organik	Solok
6	Reg.030/LSO-SB/2017	28 – 11 - 2017	Lembuti	Padang Panjang
7	Reg.055/LSO-SB/2017	20 – 11 - 2017	Berkat Yakin	Agam
8	Reg.056/LSO-SB/2017	20 – 11 - 2017	Harapan Baru	Agam



9	Reg.057/LSO-SB/2017	9 – 12 - 2017	Rosemerry Organik	Padang Panjang
10	Reg.058/LSO-SB/2017	9 – 12 - 2017	Mekar Bakti	Solok Selatan
11	Reg.059/LSO-SB/2017	9 – 12 - 2017	Simpang Tigo	Pdg.Pariaman

Untuk meningkatkan kualitas dari pertanian Organik juga dilakukan Pelatihan Lapangan Sertifikasi Organik, pelatihan lapangan persiapan sertifikasi organik dan pembinaan kepada kelompok tani organik telah diterbitkan sertifikat pertanian organik dan re-sertifikat pertanian organik oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat tahun sebelumnya.

Pelatihan Internal Control System, dilakukan pada kelompok tani yang telah menerima sertifikat dari LSO Sumatera Barat atau di kelompok tani yang sedang melakukan proses sertifikasi organik, dilaksanakan sebanyak 2 unit / 20 orang. Dari segi pembinaan di lapangan telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka meningkatkan motivasi petani dalam pengembangan pertanian organik menuju system pertanian yang ramah lingkungan dan konsumsi produk pertanian yang sehat.

Indikator kinerja ini didukung oleh program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dengan kegiatan Pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan Promosi pemasaran hasil pertanian dan penyebaran informasi pasar

4. Sasaran Strategis 4 : Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah yang Baik



A. Capaian Realisasi Program

Akuntabilitas kinerja Aparatur pemerintah dinilai dari persentase target Fisik Kegiatan dan target Keuangan Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.23. Target Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Aparatur Pemerintah yang Baik.

No	Sasaran		Indikator	Sat	Target
1	Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah yang Baik	A	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja OPD (Fisik)	%	100
		B	Persentase peningkatan capaian Kinerja OPD (Keuangan)	%	95

Akuntabilitas kinerja Aparatur pemerintah dinilai dari persentasi capaian realiasi Fisik Kegiatan dan Realiasi Keuangan. Pada tahun 2017 Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 15 Program dan 136 kegiatan. Target dari sararan 4 adalah capaian persentase Target Fisik Kegiatan 100 % dan Target Keuangan Kegiatan 97 %. Untuk tahun 2017 capaian Realisasi Fisik sebesar 99,89 % dan Realisasi Keuangan sebesar 92,42 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.24 : Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	Realisasi		
		ANGGARAN	Keuangan		Fisik
		Saving	(Rp)	(%)	%
	BELANJA LANGSUNG	57.939.385.042	53.545.725.277	92,42	99,89
I	URUSAN POKOK	10.195.054.705	9.291.187.260	91,13	100
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.826.663.605	5.257.601.480	90,23	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.282.604.500	2.105.947.358	92,26	100
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	370.310.600	370.310.600	100,00	100
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	68.480.000	60.616.700	88,52	100
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	879.800.000	813.072.161	92,42	100
07	Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset	767.196.000	683.638.961	89,11	100
08	Program Peningkatan SDM Pertanian	1.425.000.000	1.391.022.618	97,62	100
09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	477.000.000	444.002.000	93,08	100
II	PERTANIAN	45.842.330.337	42.419.513.399	92,53	99,86
10	Program Peningkatan	14.325.825.800	13.539.800.472	94,51	100



	Produksi dan Produktifitas				
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	8.664.255.600	8.426.334.879	97,25	100
12	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	8.305.126.437	7.186.001.097	86,52	100
13	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	6.947.200.000	6.150.283.654	88,53	99,06
14	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	7.276.422.500	6.799.241.097	93,44	100
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN	323.500.000	317.852.200	98,25	100

B. Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 berjumlah 579 orang PNS dan 7 orang PTT. Berdasarkan struktur organisasi perinciannya adalah 1 orang Kepala Dinas (Eselon II), 1 orang Sekretaris (Eselon III), 3 orang Kepala Bidang (Eselon III), 8 orang Kepala UPTD (Eselon III), 28 orang Kasi/Kasubbag (Eselon) IV, dan 327 orang Jabatan Fungsional Umum (JFU), 252 orang Jabatan Fungsional Khusus (JFK)/Staf. Untuk lebih jelasnya uraian dari jumlah PNS tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.25 : Jumlah PNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat Berdasarkan Golongan.

No	Golongan	Jumlah (Orang)
----	----------	----------------



1.	Golongan I	11
2.	Golongan II	116
3.	Golongan III	353
4.	Golongan IV	99

Tabel 3.26 : Jumlah PNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat Berdasarkan Pendidikan Formal.

No	Pendidikan Formal	Jumlah (Orang)
1.	Sekolah Dasar (SD)	10
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	6
3.	Sekolah Menengah Umum/Kejuruan	181
4.	D I	63
4.	D III/ Sarmud	24
5.	Strata 1	226
6.	Strata 2	69

3.3. ISU-ISU STRATEGIS



Fokus pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengembangan ekonomi rakyat, yang bersumber bukan hanya dari kegiatan usaha tani (on - farm) saja, tetapi justru sebagian besar dari kegiatan di luar usaha tani (off - farm). Beberapa permasalahan mendasar dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura antara lain adalah :

a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Konservasi Lahan

Dari tahun ke tahun terlihat bahwa tingkat kesuburan lahan sawah di Indonesia dan di Sumatera Barat khususnya semakin menurun. Berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, dari luas lahan sawah beririgasi di Indonesia sekitar 5 juta hektar, sekitar 65% diantaranya mempunyai kandungan bahan organik rendah sampai sedang (kurang dari 2%), sedangkan dalam kondisi normal lahan sawah subur mengandung bahan organik minimal 3%.

Degradasi lahan sawah terutama makin menurunnya kandungan bahan organik disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan lahan dan pencemaran lingkungan. Faktor penyebab degradasi lahan antara lain adalah pencemaran oleh bahan kimia secara berlebihan terutama pupuk dan pestisida kimia sintetis, kebiasaan petani mengangkut ke luar lahan atau membakar jerami, rendahnya penggunaan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Dari berbagai faktor penyebab degradasi lahan tersebut akar permasalahannya



adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya petani terhadap konservasi lahan pertanian.

b. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Lahan.

Optimalisasi pemanfaatan lahan belum membudaya dikalangan petani. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya lahan kosong, indek pertanaman yang rendah, belum dimanfaatkannya lahan pekarangan dan sistim budidaya polikultur yang belum banyak diterapkan petani. Kondisi ini selain tidak dapat meningkatkan nilai guna lahan juga dapat mengganggu upaya konservasi lahan.

c. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur serta prasarana lahan dan air

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaanya sangat memprihatinkan adalah ketersediaan irigasi. Banyaknya jaringan irigasi yang rusak mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian tidak mencukupi. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas.

d. Diversifikasi Usaha Tani Yang Rendah



Keluarga miskin di Sumatera Barat masih didominasi oleh Rumah Tangga Petani (RTP), dimana dari 312.600 KK terdapat 115.215 KK (36,65%) adalah RTP yang menggantungkan kehidupan pada subsektor tanaman pangan. Salah satu penyebab utama dari keadaan diatas adalah rendahnya jam kerja efektif RTP yang pada giliran menyebabkan rendahnya pendapatan petani setiap priode usaha. Rendahnya jam kerja efektif RTP sangat berkaitan erat dengan tingkat diversifikasi usaha tani, dimana saat ini indeks pekerjaan petani baru mencapai 1,8 yang artinya tiap RTP masih belum mempunyai jenis 2 jenis usaha tani.

e. Belum Tercapainya Efisiensi yang Lebih dari Kegiatan Usaha Tani

Pendekatan program yang hanya berorientasi terhadap upaya peningkatan produksi cenderung menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak efisiennya kegiatan usaha tani. Kondisi ini menyebabkan tidak tercapainya efisiensi usaha tani yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya keuntungan yang diterima petani.

f. Lemahnya Kelembagaan Petani

Salah satu strategi dalam menggerakkan petani dalam pembangunan pertanian adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani. Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan



pembangunan pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani. Namun pada saat ini kelembagaan petani belum kuat dan mandiri, sehingga belum dapat berperan secara optimal sebagai mitra pemerintah dan penyalur aspirasi petani.

g. Tingginya Kehilangan Hasil Pertanian

Upaya peningkatan produktivitas tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan upaya penekanan kehilangan hasil. Dalam proses produksi, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi . Kondisi ini belum termasuk akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan kerusakan akibat bencana alam.

h. Rendahnya Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani adalah melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian. Namun pada saat ini peningkatan nilai tambah produk pertanian masih rendah. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian disebabkan oleh belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani.

i. Masih Lemahnya Permodalan Petani

Salah satu persoalan dalam meningkatkan pendapatan petani adalah lemahnya permodalan dan akses petani ke lembaga permodalan. Masalah ini



cukup serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dilakukan penguatan permodalan dan meningkatkan akses petani ke lembaga keuangan.

j. Belum Kuatnya Sistim Penyuluhan

Sistim penyuluhan pertanian dibangun oleh subsistim sumberdaya personil, subsistim kelembagaan, subsistim sarana dan subsistim metode penyuluhan. Disadari bahwa pada saat ini sistim penyuluhan belum kuat, sehingga belum mampu secara optimal untuk melakukan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani. Faktor penyebab belum kuatnya sistim penyuluhan adalah keterbatasan penyuluh baik dari segi jumlah maupun kompetensi, kelembagaan penyuluhan yang belum mandiri dan inovatif, kurangnya sarana serta metode yang belum sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat petani

3.4 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



3.4.1. APBD (DPA-SKPD)

Pada tahun 2017 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD (DPA-OPD) sebesar Rp 116.992.511.632,- yang terdiri dari :

- c. Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 59.053.126.590,-
- d. Belanja Langsung sebesar : Rp. 57.939.385.042,-
 - Urusan Pokok : Rp. 10.195.054.705,-
 - Urusan Pilihan : Rp. 47.744.330.337,-

Alokasi penggunaan anggaran biaya tersebut termasuk untuk keperluan kegiatan dan belanja rutin pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

C. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai dan Tambahan Penghasilan PNS.

Dana ini digunakan untuk keperluan gaji dan tunjangan lainnya seperti tunjangan daerah dan sejenisnya. Realisasi s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 53.667.239.446,- (90,88 %) dengan fisik 100 %.

D. Belanja Langsung

Belanja langsung terdiri dari Belanja Langsung Urusan Pokok dan Belanja Langsung Urusan Pilihan



▪ **Belanja Langsung Urusan Pokok.**

Digunakan untuk keperluan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja keuangan dengan Pagu awal Rp. 10.195.054.705,- dengan realisasi s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.291.187.260,- atau 91,13 % dengan realisasi fisik 100 %.

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa Anggaran keseluruhan Rp. 116.992.511.6632,- dengan realisasi keuangan secara keseluruhan adalah Rp. 107.212.964.723,- atau 91,64 % dengan realisasi fisik 99,94%.

Alokasi pengguna anggaran biaya tersebut termasuk untuk keperluan kegiatan rutin pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat seperti :

- j. UPTD Balai Perlindungan Tanaman (BPT TPH)
- k. UPTD Balai Diklat Pertanian (BDP TPH)
- l. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB TPH)
- m. UPTD SMKPP Negeri Padang
- n. UPTD Balai Benih Induk (BBITPH)
- o. UPTD BMP Bukittinggi



- p. UPTD BPTBUN
- q. UPTD BP2MB
- r. Sekretariat Bakorluh

▪ **Belanja Langsung Urusan pilihan Pendidikan dan Pertanian**

Belanja langsung urusan pilihan digunakan untuk keperluan program kegiatan tahun 2017. Kegiatan ini dialokasikan pada 8 (Delapan) program. Urusan Pendidikan Anggaran sebesar Rp. 1.902.000.000,- dengan Realisasi s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.835.024.618,- atau 96,48 % dengan realisasi fisik 100 %.

Untuk Urusan Pertanian Anggaran sebesar Rp.45.842.330.337,- dengan Realisasi s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 42.419.513.399,- atau 92,53 % dengan realisasi fisik 99,86 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.27 : Realisasi Keuangan dan Fisik masing-masing Program dan Kegiatan untuk belanja langsung.

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	Realisasi		
		ANGGARAN	Keuangan		Fisik
		Saving	(Rp)	(%)	%
	BELANJA LANGSUNG	57.939.385.042	53.545.725.277	92,42	99,89
I	URUSAN POKOK	10.195.054.705	9.291.187.260	91,13	100



01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.826.663.605	5.257.601.480	90,23	100
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	75.000.000	73.192.200	97,59	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1.759.058.250	1.366.685.111	77,69	100
3	Penyediaan jasa Jaminan barang Milik daerah	151.410.100	151.409.703	100	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	2.083.239.255	1.976.222.440	94,86	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	99.610.820	99,61	100
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	155.450.000	154.818.140	99,59	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	73.712.550	98,28	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	49.290.000	98,58	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	120.000.000	99.304.000	82,75	100
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	1.000.000.000	960.206.516	96,02	100
11	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	227.000.000	227.000.000	100	100
12	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	30.506.000	26.150.000	85,72	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.282.604.500	2.105.947.358	92,26	100
1	Pengadaan Mobiler	25.000.000	24.100.000	96,40	100



2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	331.325.500	330.167.527	99,65	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/rumah dinas /mess	225.000.000	221.690.880	98,53	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	200.000.000	198.963.000	99,48	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	839.929.000	705.629.906	84,01	100
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.350.000	260.699.205	92,99	100
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	200.000.000	197.284.500	98,64	100
8	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	141.000.000	127.412.340	90,36	100
9	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	40.000.000	40.000.000	100	100
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	370.310.600	370.310.600		100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	370.310.600	370.310.600	100	100
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	68.480.000	60.616.700	88,52	100
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	68.480.000	60.616.700	88,52	100
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	879.800.000	813.072.161	92,42	100
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	135.000.000	113.959.511	84,41	100



2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan	250.000.000	219.279.150	87,71	100
3	Penatausahaan Keuangan OPD	494.800.000	479.833.500	96,98	100
07	Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset	767.196.000	683.638.961	89,11	100
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD	194.000.000	175.458.300	90,44	100
2	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	173.196.000	167.523.150	96,72	100
3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD	400.000.000	340.657.511	85,16	100
II	PENDIDIKAN	1.902.000.000	1.835.024.618	96,48	100
17	Program Peningkatan SDM Pertanian	1.425.000.000	1.391.022.618	97,62	100
1	Peningkatan SDM Petugas melalui Diklat Pertanian	850.000.000	824.087.300	96,95	100
2	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian pada SMK PP N Padang	575.000.000	566.935.318	98,60	100
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	477.000.000	444.002.000	93,08	100
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan Pertanian di Balai Diklat Pertanian	100.000.000	99.892.000	99,89	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK PP N Padang	377.000.000	344.110.000	91,28	100



III	PERTANIAN	45.842.330.337	42.419.513.399	92,53	100
10	Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas	14.325.825.800	13.539.800.472	94,51	100
1	Pemasyarakatan Padi Tanam Sabatang	992.400.000	977.806.034	98,53	100
2	Pengembangan Jagung	1.900.000.000	1.712.806.050	90,15	100
3	Pengembangan buah-buahan untuk pensejahteraan petani	427.450.000	376.204.705	88,01	100
4	Pengawasan mutu dan sertifikasi benih	537.404.000	527.773.948	98,21	100
5	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	593.981.800	591.349.978	99,56	100
6	Penyediaan Sarana Brigade dan Pengendalian Serangan OPT	500.000.000	488.312.579	97,66	100
7	Peningkatan Perlindungan Tanaman	800.000.000	783.273.861	97,91	100
8	Pemantauan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	180.000.000	175.243.100	97,36	100
9	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lahan dan Air	610.000.000	591.190.542	96,92	100
10	Identifikasi dan Registrasi Lahan/Kebun Hortikultura	350.000.000	336.787.674	96,23	100
11	Pengembangan tanaman pada kawasan TMMN dan Bakti Sosial	300.000.000	299.940.000	99,98	100
12	Pendampingan dan Penyusunan RDKK	180.000.000	173.893.350	96,61	100
13	Penerapan GAP dan SOP Buah	295.950.000	263.383.650	89,00	100
14	Pengembangan buah-buahan di kawasan pesisir	210.650.000	171.193.832	81,27	100



15	Penerapan GAP/SOP Sayur	200.000.000	198.059.250	99,03	100
16	Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan	450.000.000	405.859.500	90,19	100
17	Gerakan Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan	200.000.000	192.501.350	96,25	100
18	Pengawasan Peredaran Benih Unggul Perkebunan	245.000.000	240.559.050	98,19	100
19	Sertifikasi dan Pengujian Benih Unggul Perkebunan	210.000.000	204.540.850	97,40	100
20	Pelatihan Penerapan PHT Pada Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT)	250.000.000	245.345.600	98,14	100
21	Revitalisasi Sarana Produksi Tanaman Tembakau (DBHCHT)	250.000.000	240.584.151	96,23	100
22	Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat	250.000.000	227.826.650	91,13	100
23	Pengendalian Hama Tupai Tanaman Kakao dan Kelapa	500.000.000	498.555.850	99,71	100
24	Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kakao	350.000.000	301.405.050	86,12	100
25	Gerakan Pemangkasan dan Pemupukan Kakao	886.000.000	780.710.500	88,12	100
26	Pengembangan Tanaman Perkebunan Pada Kawasan TMMN dan Bakti Sosial	250.000.000	215.136.550	86,05	100
27	Pemantauan Pupuk dan Pestisida Perkebunan	75.000.000	73.650.150	98,20	100
28	Peningkatan Penyediaan Baby Kelapa Sawit Bersertifikat	272.600.000	247.041.450	90,62	100
29	Identifikasi Pengamatan Penyebaran Kakao BL 50	144.250.000	133.873.700	92,81	100
30	Pengawasan Mutu Standar				



	Pestisida	350.000.000	348.130.250	99,47	100
31	Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	180.000.000	173.826.660	96,57	100
32	Demplot pisang Sehat	300.000.000	299.937.000	99,98	100
33	Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)	1.085.140.000	1.043.097.608	96,13	100
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	8.664.255.600	8.426.334.879	97,25	100
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Induk	500.000.000	497.722.177	99,54	100
2	Pengembangan Alsintan dan Bengkel Keliling	820.000.000	735.857.800	89,74	100
3	Pengelolaan sarana dan prasarana agrowisata BBI Lubuk Minturun	249.635.000	248.846.000	99,68	100
4	Peningkatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen	246.298.000	235.237.000	95,51	100
5	Peningkatan Penggunaan Alat Mesin Pertanian dan Pasca Panen	250.000.000	232.164.900	92,87	100
6	Dukungan pengembangan agrowisata BBI TPH Lubuk Minturun	500.000.000	499.639.778	99,93	100
7	Peningkatan Penerapan Mutu Fermentasi Kakao	250.000.000	213.431.100	85,37	100
8	Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Balai Diklat Pertanian (DAK)	5.467.576.600	5.425.141.124	99,22	100
9	Pembangunan/Rehabilitasi UPTD SMK PP (DAK)	380.746.000	338.295.000	88,85	100
12	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	8.305.126.437	7.186.001.097	86,52	100
1	Penyediaan Benih Sumber				



	Kentang Bermutu	300.000.000	299.887.500	99,96	100
2	Pemurnian Varietas dan Adaptasi Pelepasan Varietas (varietas lokal)	294.506.000	290.698.000	98,71	100
3	Penyelenggaraan Penas Tani	500.000.000	491.611.200	98,32	100
4	Penumbuhan dan Pengembangan Desa Mandiri Benih	100.000.000	93.010.200	93,01	100
5	Penyusunan dan Updating Data Perkembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan	289.719.000	264.773.200	91,39	100
6	Pembinaan dan peningkatan SDM Tenaga pendamping POPT dan PMT	250.000.000	240.397.900	96,16	100
7	Penyebarluasan Informasi/bahan publik (jumpa pers, temu kehumasan, dialog inter aktif dan advokasi di media cetak	300.000.000	291.910.800	97,30	100
8	Koordinasi Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	500.000.000	476.292.000	95,26	100
9	Temu Rembuk Petugas Pengamat OPT	100.000.000	92.057.000	92,06	100
10	Pengawasan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Pembinaan Brigade Proteksi	249.995.000	237.758.550	95,11	100
11	Revitalisasi Kelembagaan Petani Gambir	150.000.000	141.374.200	94,25	100
12	Penerapan Inovasi Teknologi Kawasan Pada Sentra kakao, Kopi dan Kelapa	200.000.000	146.827.100	73,41	100
13	Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan	61.465.600	59.421.076	96,67	100
14	Pembinaan SDM Penyuluh Pertanian	2.132.500.000	1.334.365.392	62,57	100



15	Sosialisasi dan Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi	150.000.000	143.841.900	95,89	100
16	Pembinaan dan Pengembangan penangkar tanaman pangan dan Hortikultura	150.000.000	131.230.350	87,49	100
17	Pelatihan Penangkar dan Pengembangan Kacang Tanah, ubi jalar	150.440.837	145.972.140	97,03	100
18	Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Alsintan	400.000.000	378.916.555	94,73	100
19	Pemberdayaan Kelembagaan Tani	750.000.000	716.775.734	95,57	100
20	Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Pelatihan Petani Swadaya	150.000.000	134.978.900	89,99	100
21	Peningkatan SDM Petugas dan Penangkar Benih Perkebunan	175.000.000	170.730.000	97,56	100
22	Pelatihan Perbanyak Agen Pengendalian Hayati Tricoderma sp	150.000.000	146.129.750	97,42	100
23	Sosialisasi Penggunaan Bibit Bersertifikat	100.000.000	97.496.300	97,50	100
24	Pelatihan Lapangan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Perkebunan	168.000.000	159.053.650	94,67	100
25	Pembinaan Penyuluh Swadaya	300.000.000	274.603.200	91,53	100
26	Pembinaan Balai Penyuluhan Model	73.500.000	72.908.000	99,19	100
27	Pembinaan Kelembagaan Tani	160.000.000	152.980.500	95,61	100
13	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	6.947.200.000	6.150.283.654	88,53	100



1	Pengembangan dan Peningkatan SDM kelp. Pengolahan Hasil serta Nilai Tambah produk Pertanian	815.000.000	775.033.200	95,10	100
2	Peningkatan Mutu Produk Olahan Kelompok Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP)	623.000.000	570.925.450	91,64	100
3	Sertifikasi Pangan dan Pemasyarakatan Pertanian Organik	800.000.000	744.763.135	93,10	100
4	Promosi Pemasaran Hasil Pertanian dan Penyebaran Informasi Pasar	1.303.000.000	1.164.016.578	89,33	100
5	Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	450.000.000	430.334.950	95,63	100
6	Promosi dan Expo Komoditi Perkebunan	250.000.000	232.567.867	93,03	100
7	Penetapan Harga dan Pengawasan Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit	325.000.000	55.104.850	16,96	100
8	Indikasi Geografis Kopi Spesial (Arabika)	250.000.000	236.795.495	94,72	100
9	Peragaan Mutu Kopi Sumatera Barat	195.000.000	187.441.200	96,12	100
10	Pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Komoditi Perkebunan	200.000.000	184.461.436	92,23	100
11	Peningkatan Standarisasi Hasil Perkebunan	335.000.000	309.107.777	92,27	100
12	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Produk Olahan Pertanian Secara Terpadu	250.000.000	236.596.350	94,64	100
13	Lomba Tanaman Pangan dan Holtikultura	300.000.000	235.456.400	78,49	100



14	Penyusunan Profil Kakao dan Kopi Arabika	139.700.000	123.002.500	88,05	100
15	Gelar Diversifikasi Produk Kelapa Rakyat	150.000.000	131.757.349	87,84	100
16	Peningkatan Olahan Produk Kelapa Rakyat	266.500.000	246.593.367	92,53	100
17	Optimasi Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tebu	295.000.000	286.325.750	97,06	100
14	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	7.276.422.500	6.799.241.097	93,44	100
1	Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	300.000.000	254.076.600	84,69	100
2	Peningkatan Penggunaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat	400.000.000	386.177.300	96,54	100
3	Pengembangan dan Perluasan Tanaman Kopi Rakyat	550.000.000	453.186.000	82,40	100
4	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Padi	800.000.000	795.876.150	99,48	100
5	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Jagung	600.000.000	561.294.300	93,55	100
6	Pembinaan dan Pengembangan Manggis	500.000.000	452.976.300	90,60	100
7	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura	650.000.000	627.757.550	96,58	100
8	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Sayur	500.000.000	499.040.500	99,81	100
9	Pembinaan dan Pengembangan Jeruk	731.422.500	616.356.800	84,27	100
10	Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Hias	400.000.000	383.908.300	95,98	100
11	Perluasan Tanaman Pala Rakyat				



		350.000.000	347.880.050	99,39	100
12	Perluasan Tanaman Cengkeh	395.000.000	394.044.790	99,76	100
13	Peremajaan Tanaman Kelapa Rakyat	250.000.000	233.936.000	93,57	100
14	Pengembangan Kultivar Tebu Rakyat	150.000.000	146.624.202	97,75	100
15	Pengembangan Nagari Model Kakao dan Kelapa	500.000.000	472.533.300	94,51	100
16	Penyusunan data komoditi perkebunan	200.000.000	173.572.955	86,79	100
15	Program Pemberdayaan Penyuluhan	323.500.000	317.852.200	98,25	100
1	Penyusunan Programa Penyuluhan	73.500.000	73.156.750	99,53	100
2	Pengelolaan Data dan Informasi Penyuluhan	75.000.000	74.629.500	99,51	100
3	Pembinaan Stakeholder Penyuluhan	100.000.000	96.652.000	96,65	100
4	Gerakan Penyuluhan Pada Kawasan Terintegrasi	75.000.000	73.413.950	97,89	100

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2017 dan berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat untuk belanja langsung sebesar 99,89 persen dan capaian keuangan sebesar 92,42 persen.



Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target / efisiensi, sebagai berikut :

Pada tahun 2017, ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan atau **efisiensi** . Kegiatan-kegiatan tersebut anatara lain :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik. Pagu dana Rp. 1.759.058.250,- dengan serapan sebesar Rp. 1.366.685.111,- atau 77,69 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Terdapat sisa dari pembayaran rekening listrik sebesar Rp. 392.373.139,- / **efisiensi**. Alasannya Adanya Pemindahan Pemakaian Air Dari PDAM Ke Sumur Pompa untuk Balai Diklat Pertanian
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Pagu dana sebesar Rp. 68.480.000,- dengan serapan dana sebesar Rp 60.616.700,- atau 88,52 % dengan realisasi fisik 100 %. Rendahnya serapan karena Undangan utk pelatihan hanya datang 2 kali, yaitu undangan Pelatihan pengadaan barang /jasa dan Undangan LAKIP 3 orang.
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD. Pagu dana sebesar Rp. 135.000.000,- dengan serapan dana sebesar Rp.



- 113.959.511,- atau 84,41 % dan realisasi fisik 100 %. Rendahnya serapan karena tidak keluar SK Gubernur untuk Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja 2 org & Honor Simbangda 1 Org.
- d. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD. Pagu dana sebesar Rp.400.000.000,- dengan serapan dana sebesar Rp. 340.657.511,- atau 85,16 % karena Honor Petugas Pembantu di 8 (delapan) UPTD tidak dibayarkan karena tidak keluar di SK Gubernur, Penggantian Tansportasi peserta pada Acara Pertemuan Aset untuk peserta dari UPTD BPTPH, BDPTPH dan Bidang tidak bisa dibayarkan dan 2 (dua) orang Honor Narasumber.
- e. Peningkatan Penyediaan Baby Kelapa Sawit Bersertifikat. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp.272.600.000,- dengan serapan sebesar Rp.247.041.450,- atau 90,62 %. Pembayaran Upah Buruh Untuk Penyiangan Pemupukan, Pengendalian Hama dan Penyiraman tidak dapat dibayarkan karena benih kelapa sawait disalurkan untuk kelompok siap tanam terlalu cepat dari rencana semula.
- f. Pembinaan SDM Penyuluh Pertanian. Pagu dana Rp.2.132.500.000,- serapan sebesar 1.334.365.392 atau 62,57%. Honor dan BOP THL yang semula di targetkan pembayaran untuk 2 (dua) bulan, di bayarkan hanya 1 (satu) bulan karena adanya surat edaran dari Kementrian Pertanian, tentang pembayaran Honor dan BOP THL dari pusat sebanyak 1 (satu) bulan.
- g. Penetapan Harga dan Pengawalan Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. Pagu dana Rp. 325.000.000,- dengan serapan sebesar Rp.55.104.850,- atau 16,96 %. Rendahnya keuangan disebabkan untuk kegiatan yang sama



dengan kegiatan yang bersumber dari APBN tentang konsumsi peserta pertemuan.

Secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau rendahnya serapan anggaran disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Rasionalisasi perjalanan dinas keluar daerah.
2. Efisiensi penggunaan anggaran.
3. Pemakaian sesuai dengan kebutuhan

3.4.2. DANA APBN (DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN)

A. Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi

Pada tahun 2017 anggaran yang bersumber dari APBN yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat secara total sebesar : Rp.40.426.432.000,- dengan rincian Program / Kegiatan sebagai tabel berikut :

Tabel 3.28. : Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi Tahun 2017.

No	Program/ Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	%
----	-------------------	----------	---------------	---



018.03.06	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (Dana Dekonstrasi 03)	10.347.645.000	9.897.613.800	95,65
1761.617	Dokumen Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	34.400.000	25.719.150	74,76
1762.624	Dokumen Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	468.188.000	408.201.615	87,19
1763.631	Fasilitas Perbanyak Benih Sumber Tanaman Pangan	559.000.000	551.847.015	98,72
1763.632	Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	1.514.750.000	1.509.942.150	99,68
1763.633	Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikasi	181.020.000	131.510.340	72,65
1764.641	Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI (Ha)	4.776.634.000	4.621.646.830	96,76
1766.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2.437.453.000	2.304.734.800	94,56
5885.853	Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	161.300.000	146.665.400	90,93
5885.854	Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	214.900.000	197.346.500	91,83
018.04.07	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura(dana Dekonsentrasi 04)	2.126.787.000	2.096.375.550	98,57
1772.024	Produksi Benih Bawang Merah	144.000.000	143.912.200	99,94
1772.060	Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	372.000.000	367.296.950	98,74
1773.060	Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura	1.020.000.000	1.007.843.200	98,81
1774.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	92.166.000	90.838.000	98,56
1774.994	Layanan Perkantoran	441.661.000	429.592.700	97,27
5887.058	Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura	56.960.000	56.892.500	99,88



018.08.11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (dana Dekonsentrasi 08)	9.054.540.000	8.030.051.397	88,69
1794.006	Layanan dan Pembinaan Kegiatan Lingkup Kegiatan Irigasi Pertanian	112.080.000	109.859.354	98,02
1795.006	Design Cetak Sawah	1.530.000.000	576.000.000	37,65
1795.007	Layanan dan Pembinaan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	208.400.000	200.440.000	96,18
1796.002	Layanan dan Pembinaan Kegiatan Lingkup Alsintan	48.400.000	48.400.000	100,00
1797.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	7.042.260.000	6.983.771.557	99,17
3993.002	Data Layanan operasional Pengawasan Pupuk Subsidi	41.400.000	41.300.000	99,76
3993.004	Layanan dan Pembinaan Kegiatan Lingkup Pupuk Pestisida	22.000.000	21.947.000	99,76
3994.003	Layanan dan Pembinaan Kegiatan Pembiayaan Pertanian	50.000.000	48.333.486	96,67
018.10.13	Program Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (dana Dekonsentrasi 10)	18.288.030.000	16.310.852.624	89,19
1812.001	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian	16.658.030.000	14.718.435.347	88,36
1812.002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	117.900.000	11.000.000	9,33
5892.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1.630.000.000	1.592.417.277	97,69
018.05.08	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (dana Dekonsentrasi 05)	671.430.000	633.279.080	94,32
1779.006	Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan	20.960.000	20.714.000	98,83



1780.005	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya	550.470.000	524.568.580	95,29
5889.005	Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan	100.000.000	87.996.500	88,00

B. Penyelenggaraan Dana Tugas Pembantuan

Pada tahun 2017 anggaran yang bersumber dari APBN yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat secara total sebesar : Rp.175.343.982.000,- dengan rincian Program / Kegiatan sebagai tabel berikut :

Tabel 3.29. : Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan APBN Dana Tugas Pembantuan Tahun 2017.

No	Program/ Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	%
018.03.06	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (Dana Tugas Pembantuan (03)	88.820.745.000	84.711.044.250	95,37
1761.611	Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai	19.993.500.000	17.994.879.500	90,00
1762.621	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	18.086.170.000	17.705.133.300	97,89
1762.622	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	43.734.199.000	42.688.180.250	97,61
1763.633	Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat	2.236.890.000	2.148.264.300	96,04
1766.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.206.436.000	959.592.400	79,54
5885.851	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	3.563.550.000	3.214.994.500	90,22
018.04.07	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (dana Tugas Pembantuan 04)	12.144.719.000	11.135.127.799	91,69



1771.024	Kawasan Bawang Merah	1.132.628.000	1.117.428.000	98,66
1.771.025	Kawasan Sayuran Lainnya	240.000.000	225.992.250	94,16
1771.051	Kawasan Aneka Cabai	6.223.035.000	6.114.592.109	98,26
1772.022	Produksi Benih Buah Lainnya	918.750.000	365.437.500	39,78
1.772.027	Produksi Benih Jeruk	600.000.000	447.888.750	74,65
1.772.061	Produksi Benih Biji Lainnya	67.500.000	63.000.000	93,33
1774.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	227.600.000	223.259.450,0	98,09
1774.994	Layanan Perkantoran	368.400.000	330.135.550	89,61
5886.024	Kawasan Buah Lainnya	1.190.000.000	1.116.418.190	93,82
5886.027	Kawasan Jeruk	1.176.806.000	1.130.976.000	96,11
018.08.11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (dana Tugas Pembantuan (08)	37.134.138.000	33.589.623.075	90,45
1794.001	Jaringan Irigasi Tersier	5.433.760.000	5.433.760.000	100,00
1794.002	Irigasi Air Permukaan	400.000.000	400.000.000	100,00
1794.003	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	1.800.000.000	1.800.000.000	100,00
1795.001	Perluasan Sawah	8.684.220.000	6.697.644.150	77,12
1795.003	Prasertifikasi Lahan Pertanian	320.000.000	83.941.400	26,23
1795.004	Optimasi Lahan	693.000.000	642.255.000	92,68
1.796.001	Alat Mesin Pertanian	14.791.898.000	14.033.647.941	94,87
1797.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2.111.560.000	1.815.368.911	85,97
3993.002	Data Layanan operasional Pengawasan Pupuk Subsidi	2.624.700.000	2.447.870.673	93,26
3994.003	Layanan dan Pembinaan Kegiatan	275.000.000	235.135.000	85,50



	Pembiayaan Pertanian			
018.05.08	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (Tugas Pembantuan 05)	37.244.380.000	28.008.081.303	75,20
1777.001	Pengembangan Tanaman Tahunan	15.484.000.000	10.522.518.132	67,96
1777.003	Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	3.847.000.000	3.743.031.395	97,30
1777.004	Pengembangan Tanaman Penyegar Lainnya	2.790.000.000	1.575.600.000	56,47
1777.005	Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan Kering	987.600.000	111.579.488	11,30
1779.003	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	278.500.000	263.580.000	94,64
1779.006	Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan	95.000.000	95.000.000	100,00
1779.007	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	44.250.000	42.063.700	95,06
1780.005	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya	420.050.000	370.123.362	88,11
5888.001	Pengembangan Tanaman Semusim Lainnya	1.383.350.000	1.220.991.601	88,26
5888.002	Pengembangan Tanaman Rempah	560.000.000	458.818.300	81,93
5.888.003	Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering	865.250.000	479.458.600	55,41
5888.004	Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	3.344.400.000	3.224.696.500	96,42
5889.001	Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	1.123.250.000	1.001.928.975	89,20
5889.003	Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	1.701.430.000	1.632.769.600	95,96



5890.001	Penyediaan Benih Unggul Tan . Bun	3.973.716.000	2.956.695.000	74,41
5890.002	Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	346.584.000	309.226.650	89,22



BAB IV

PENUTUP

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya, selanjutnya ditulis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LAKIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program daerah untuk belanja langsung mencapai realisasi fisik sebesar 92,42 % dan realisasi keuangan sebesar 99,89% yang terdiri dari 14 Program dengan 136 kegiatan.
2. Untuk Program Nasional secara keseluruhan dari 5 program yang dilaksanakan pelaksanaan secara fisik terealisasi sebesar 98,51 % dan realisasi keuangan sebesar 90,18 %.



3. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.
4. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021, yaitu:
 - a. Memenuhi Kebutuhan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
 - b. Meningkatkan Mutu Produk Hasil, Nilai Tambah dan daya Saing Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
 - c. Mengembangkan Pertanian Organik yang Modern
 - d. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan masih terus mengadakan perbaikan-perbaikan yang akan dituangkan dalam perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi menyeluruh untuk tahun berikutnya. Sebab hasil LAKIP ini tidaklah hanya dibandingkan dengan capaian kinerja nyata pada tahun sebelumnya, tetapi harus memperhatikan pula kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, juga harus membandingkan dengan indikator lain seperti tingkat kesejahteraan masyarakat tani, kondisi perekonomian dan sebagainya.



Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.



LAMPIRAN